



NOTA KEUANGAN
DAN
RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 1969/1970

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA UNDANG-UNDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 1969 – 1970
(1 APRIL 1969 S.D 31 MARET 1970)

NOTA KEUANGAN

I. UMUM

Tahun anggaran 1969 – 1970 merupakan tahun pertama daripada pelaksanaan pembangunan yang sudah lama dicita-citakan. Pelaksanaan pembangunan yang sungguh-sungguh diperlukan untuk dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan harapan rakyat Indonesia seluruhnya. Pelaksanaan pembangunan yang berhasil mensyaratkan adanya tekad dan kesungguhan untuk sepenuhnya mengabdikan dan melibatkan diri di dalam usaha-usaha pembangunan tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun tekad dan kesungguhan tersebut diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan usaha-usaha pembangunan yang sesungguhnya. Tindakan semacam itu hanya menghabiskan waktu dan tenaga saja dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan dilihat dari sudut pelaksanaan dan tujuan pembangunan yang sesungguhnya.

Pemborosan-pemborosan waktu dan tenaga tersebut sekarang telah dihentikan. Pemerintah sejak dua tahun terakhir ini sepenuhnya berusaha memberikan landasan yang kokoh serta iklim yang sehat untuk dapat melancarkan usaha-usaha pembangunan secara berhasil. Langkah-langkah pendahuluan telah ditujukan untuk menciptakan stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian. Hanya dengan adanya stabilisasi dan rehabilitasi itulah dapatdimulai usaha-usaha pembangunan yang memebrikan hasil. Manifestasi daripada pembaharuan tekad dan kesungguhan untuk membangun ini telah dituangkan dalam berbagai ketetapan hasil-hasil sidang M.P.R.S. tahun 1966, terutama Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/1966. Didalam ketetapan-ketetapan M.P.R.S. tahun 1968 tugas yang diletakkan pada bahu Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ini lebih dipertegas lagi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menentukan bahwa tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah melanjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera dengan perincian sebagai berikut :

- (a) Menciptakan stabilisasi Politik dan Ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
- (b) Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

- (c) Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No.42/MPRS/1968.
- (d) Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G.30.S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (e) Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat dan Daerah.

Sudah barang tentu tugas pembangunan itu tidak akan dapat berhasil bila beberapa prasyarat tidak dipenuhi atau tidak ada.

Prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk berhasilnya pembangunan itu adalah :

- (1) adanya kepemimpinan Negara dan Pemerintahan yang sepenuhnya merasa dan bertindak terikat pada usaha-usaha pembangunan;
- (2) terciptanya suatu mentalitas rakyat yang yakin akan berhasilnya suatu pembangunan, sehingga dengan demikian bersedia untuk memikul segala biaya dan akibat-akibatnya dan turut-serta didalamnya;
- (3) adanya kesepakatan tentang sasaran-sasaran dan cara-cara untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tersebut, sasaran-sasaran dan cara-cara mana haruslah cukup realistis mengingat kondisi, waktu dan tempat; dengan perkataan lain, harus ada suatu rencana pembangunan yang baik dan realistis;
- (4) memiliki sumber-sumber, baik yang bersifat manusia, kekayaan alam maupun modal, yang dapat dikerahkan untuk melaksanakan usaha-usaha pembangunan; dan akhirnya
- (5) memiliki perangkat kelembagaan masyarakat yang membantu bahkan turut serta di dalam usaha-usaha pembangunan.

Seperti telah disebutkan di muka, usaha-usaha pembangunan harus didahului dengan usaha-usaha mewujudkan stabilisasi dan rehabilitasi. Hasil-hasil yang telah dicapai Pemerintah selama dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa usaha-usaha menciptakan stabilisasi harga semakin lama semakin berhasil. Bila di dalam tahun 1966 tingkat kenaikan indeks biaya hidup adalah 637 % setahun atau 53 % rata-rata per bulan, maka di dalam tahun 1967 indeks biaya-hidup itu hanya naik 112 % setahun atau 9 % rata-rata per bulan. Di dalam 11 bulan pertama tahun 1968 keadaannya adalah lebih baik lagi, yaitu indeks biaya-hidup hanya bergerak ke atas sebesar 79 % atau 7 % rata-rata per bulan. Bila diambil masa semester kedua tahun 1968, maka kemantapan harga lebih kelihatan, sebab indeks biaya hidup hanya bergerak ke atas sebesar 11 % atau 2 % rata-rata per bulan.

Perkembangan harga beras, sebagai faktor yang paling menentukan dan paling peka bagi rakyat banyak juga menunjukkan kemantapan di dalam tahun 1968 ini. Di dalam bulan Januari 1968 ini. Di dalam bulan Januari 1968 harga beras memang naik cukup tinggi, tetapi setelah itu dengan cepat menurun dan terutama di dalam semester kedua tahun 1968 menunjukkan kemantapan yang cukup menggembirakan rakyat banyak. Kemantapan harga beras ini disebabkan oleh peningkatan produksi beras dalam tahun 1968 yang cukup besar disertai dengan kebijaksanaan import beras yang cukup berhasil pula.

Mengenai produksi beras yang meningkat di dalam tahun 1968 ini Pemerintah ingin menjelaskan bahwa keadaan cuaca dan alam memang sangat membantu. Hanya saja ada pula beberapa faktor lain yang harus diperhitungkan, seperti : penemuan bibit unggul PB-5 dan PB-8, penyediaan pupuk dan insektisida yang cukup serta pekerjaan penyuluhan penanaman yang lebih baik.

Di samping itu Pemerintah telah pula menempuh kebijaksanaan harga pembelian beras yang dimaksudkan untuk dapat menimbulkan peningkatan daya-beli para petani sehingga merupakan rangsangan bagi mereka untuk meningkatkan produksi padi.

Usaha-usaha rehabilitasi juga menunjukkan hasil-hasil yang memuaskan. Selain peningkatan produksi beras seperti disebutkan di atas, dimana target 9,8 juta ton kemungkinan besar akan dapat dilampaui, juga peningkatan produksi sandang dan bahan-pokok lainnya terus diusahakan. Pemerintah senantiasa berusaha menjaga agar persediaan bahan-bahan pokok ini ada dalam jumlah yang cukup di pasaran sehingga kemantapan harga dapat dipertahankan.

Di dalam bidang prasarana usaha-usaha rehabilitasi diadakan semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuan anggaran pembangunan Pemerintah. Rehabilitasi di bidang prasarana ini diusahakan baik yang langsung mendukung peningkatan produksi pertanian dan industri yang sifatnya meningkatkan efisiensi serta perluasan perhubungan darat, laut, udara dan telekomunikasi.

Satu usaha rehabilitasi yang sangat penting pula ialah peningkatan ekspor, sebab devisa yang dihasilkannya sangat penting bagi pembiayaan impor bahan-bahan baku, bahan-bahan penolong, barang-barang modal serta barang-barang konsumsi lainnya. Dengan memberikan perangsang yang lebih besar kepada eksportir serta penyederhanaan prosedur dan administrasi ekspor diusahakan agar ekspor dapat ditingkatkan. Dalam rangka usaha itu patut pula disebutkan usaha-usaha meningkatkan mutu barang-barang ekspor serta usaha-usaha penyempurnaan pemasarannya.

Untuk keperluan usaha-usaha rehabilitasi ini maka kebijaksanaan di bidang anggaran, perkreditan serta perdagangan luar negeri telah diarahkan serta senantiasa disempurnakan sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan serta tersedia fasilitas-fasilitas yang lebih besar bagi keperluan-keperluan usaha-usaha tersebut.

Dengan keperluan usaha-usaha rehabilitasi ini maka kebijaksanaan di bidang anggaran, perkreditan serta perdagangan luar negeri telah diarahkan serta senantiasa disempurnakan sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan serta tersedia fasilitas-fasilitas yang lebih besar bagi keperluan usaha-usaha tersebut.

Dengan bermodalkan hasil-hasil stabilisasi dan rehabilitasi yang telah dicapai selama dua tahun terakhir ini, maka Pemerintah berpendapat bahwa telah diwujudkan suatu landasan yang kokoh serta iklim yang sehat untuk dapat melancarkan usaha-usaha pembangunan yang sesungguhnya di dalam tahun anggaran 1969-1970 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Seperti diketahui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), seperti juga rencana pembangunan pada umumnya, bertujuan untuk menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita serta memperluas kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia.

REPELITA tersebut haruslah disesuaikan dan disempurnakan tiap tahun sesuai dengan hasil-hasil yang dicapai dan prognosa-prognosa yang diperkirakan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Untuk sektor Pemerintah alat guna melaksanakan program-program tahunan dari REPELITA itu adalah APBN. Jadi Anggaran Pembangunan dari APBN tahun anggaran 1969-1970 merupakan alat untuk melaksanakan REPELITA untuk tahun anggaran yang bersangkutan, dan begitu seterusnya untuk tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Begitu pula prioritas Anggaran Pembangunan dari APBN 1969-1970 merupakan prioritas REPELITA untuk tahun anggaran yang bersangkutan, dan seterusnya. Berhubung dengan itu jelas pulalah persoalannya bahwa rencana fisik, rencana pembiayaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan (*development policies*) serta perincian menurut bidang, waktu dan daerah dari APBN untuk sesuatu tahun anggaran merupakan cermin dari pelaksanaan REPELITA untuk tahun anggaran yang sama.

Apa yang berlaku bagi sektor Pemerintah seperti dijelaskan tadi berlaku pula bagi sektor swasta. Dengan demikian jelaslah bahwa pelaksanaan REPELITA tidak dapat terlepas dari kemampuan pembiayaan yang dapat dihasilkan oleh masyarakat seluruhnya.

Seluruh sumber-sumber pembiayaan yang dapat dihasilkan dan disisihkan oleh masyarakat, baik oleh sektor Pemerintah maupun sektor swasta, untuk usaha-usaha

pembangunan di dalam sesuatu tahun anggaran merupakan batas-batas (*constraints*) yang menandai sampai dimana usaha-usaha pembangunan untuk tahun anggaran tersebut dapat dilaksanakan. Batas-batas (*constraints*) ini pulalah yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan pilihan (*choice*) diantara sekian banyak bidang sasaran yang dihadapi. Untuk keperluan ini disusunlah skala-prioritas.

Dalam rangka ini, maka REPELITA 1969-1970 s.d. 1973-1974, sebagai rencana pembangunan tahap pertama, telah menentukan sektor pertanian sebagai bidang sasaran utama dari segala kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dengan demikian, maka strategi umum REPELITA ini dapat disimpulkan sbb. :

- (a) terarah : kegiatan pembangunan diprioritaskan pada sektor pertanian sebagai tahap pertama dari REPELITA ;
- (b) simultan : dalam arti (i) sektor-sektor perusahaan lainnya juga dibangun untuk menunjang sektor pertanian, (ii) usaha-usaha peningkatan tabungan juga dilaksanakan bersama-sama dengan investasi-investasi pembangunan dan (iii) sektor swasta diusahakan supaya turut-serta bersama-sama Pemerintah melaksanakan usaha-usaha pembangunan.

Kondisi-kondisi obyektif yang ada di Indonesia mengharuskan Pemerintah untuk menentukan sektor pertanian sebagai prioritas-utama kegiatan-kegiatan pembangunan REPELITA 1969-1970 s.d. 1973-1974.

Dengan memahami hal-hal yang disebutkan tadi maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah untuk tahun anggaran 1969-1970 akan mencapai jumlah yang besarnya diperkirakan Rp 123,4 milyar. Perkiraan sebesar Rp 123,4 milyar ini sumber-sumbernya ialah : nilai lawan rupiah BE Kredit, *Project Aid* dan bagian yang disisihkan dari penerimaan dalam negeri (*public savings*).

Di samping jumlah Rp 123,4 milyar ini, maka masih ada lagi kegiatan-kegiatan pembanguann dalam rangka REPELITA yang pembiayaannya diharapkan diperoleh dari sektor swasta.

Hanya saja oleh karena kegiatan-kegiatan seperti ini sifatnya non-budgeter, maka hal ini tidak dibicarakan di dalam APBN 1969-1970. Namun perlu ditekankan di sini bahwa pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya diharapkan datang dari sektor swasta ini akan terus diusahakan peningkatannya dengan bermacam-macam dorongan oleh Pemerintah. Misalnya, melalui deposito berjangka. Pemerintah berusaha mengumpulkan dan memanfaatkan sumber-sumber masyarakat yang potensiil ini. Usaha deposito berjangka ini telah menunjukkan hasilnya dimana sejak dimulainya pada

permulaan Oktober 1968 sampai akhir Nopember 1968 telah terkumpul pada Bank-bank Pemerintah deposito berjangka sebesar Rp. 3,1 milyar.

Sejauh mengenai sektor Pemerintah, maka anggaran pembangunan sebesar Rp 123,4 milyar tersebut dapat diperoleh dari gambaran ringkas APBN 1969-1970 seperti di bawah ini :

Tabel 1
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1969 - 1970
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan		Pengeluaran	
I Penerimaan Rutin	228.000	I Pengeluaran Rutin	204.044
1. Pajak Langsung	91.200	1. Belanja Pegawai	93.408
2. Pajak tidak Langsung	134.300	2. Belanja Barang	50.524
3. Penerimaan Non-tax	2.500	3. Subsidi/perimbangan keuangan	41.412
		4. Bunga/cicilan hutang	16.500
		5. Lain-lain	2.200
II Penerimaan Pembangunan	99.418	II Pengeluaran Pembangunan ^{x)}	123.374
1. Kredit Luar Negeri	63.184	1. Bidang Ekonomi	94.435
2. Project Aid	36.234	2. Bidang Sosial	19.604
		3. Bidang Umum	9.335
Jumlah Penerimaan	327.418	Jumlah Pengeluaran	327.418

^{x)} Public savings sebesar Rp 24,0 milyar diperhitungkan.

Adapun perincian lebih lanjut dari pada perkiraan-perkiraan APBN 1969-1970 di atas dapat dibaca pada daftar-daftar tersendiri yang dilampirkan bersama Nota Keuangan ini.

Satu hal yang baru dalam APBN 1969-1970 ini ialah perkiraan bahwa untuk tahun 1969-1970 akan dapat disisihkan sebagian dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 24,0 milyar untuk turut membiayai Anggaran Pembangunan 1969-1970. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan lebih lanjut pelaksanaan prinsip anggaran berimbang yang pemakaiannya sudah sejak tahun anggaran 1967 yang lalu. Seperti diketahui dalam tahun 1967 prinsip tersebut dimaksudkan berlaku untuk seluruh APBN, tanpa mempersoalkan komponen-komponennya. Untuk tahun anggaran 1963 prinsip tersebut juga berlaku bagi komponen-komponennya, yaitu Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan masing-masing diusahakan seimbang. Sedangkan APBN 1969-1970 ddiperkirakan akan mampu menyisihkan sebagian dari penerimaan dalam negeri, jadi sebagian dari penerimaan rutin, untuk dipergunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi Anggaran Pembangunan. Hal tersebut dimungkinkan oleh perkiraan-

perkiraan bahwa kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional akan meningkat sehingga penerimaan negara juga meningkat. Disertai dengan usaha-usaha pengamatan serta pengarahannya yang lebih baik di bidang pengeluaran negara diperkirakan dapat disisihkan sebagian dari penerimaan dalam negeri itu untuk membiayai pembangunan.

II. SITUASI PEREKONOMIAN

1. Perkembangan negara.

Perkembangan harga di dalam tahun 1968 menunjukkan gerakan yang lebih mantap bila dibandingkan dengan keadaannya di dalam tahun 1967. Bila dibandingkan dengan perkembangan di dalam tahun 1966, yaitu sebelumnya usaha-usaha stabilisasi dan rehabilitasi dilancarkan secara sungguh-sungguh, maka perkembangan harga di dalam tahun 1968 telah memperlihatkan hasil-hasil yang jauh lebih mantap lagi. Di bawah ini disajikan suatu tabel yang memperlihatkan perkembangan indeks biaya hidup dan indeks harga beras sejak tahun 1966

Tabel 2.
Indeks Biaya - Hidup, dan Indeks Harga Beras, 1966 - 1968
(Oktober 1966 = 100)

M a s a	Biaya-Hidup		Beras	
	Setahun	Rata-rata Bulanan	Setahun	Rata-rata Bulanan
1966	637	53	194 ^{x)}	16 ^{x)}
1967	112	9	271	23
1968 : Jan. - Nop.	79	7	28	3
Juli - Nop.	11	2	7	1

Sumber : B.P.S.

Diolah kembali oleh Departemen Keuangan

^{x)} Angka perkiraan.

Jika diambil masa semester kedua tahun 1968 maka ternyata bahwa perkembangan indeks biaya hidup dan indeks harga beras telah dapat ditekan lebih rendah lagi dibandingkan dengan perkembangannya untuk seluruh tahun 1968. Bahkan harga beras menunjukkan penurunan yang cukup berarti selama semester kedua tahun 1968 ini.

Seperti telah dijelaskan di dalam bagian Umum di muka, perkembangan harga beras yang sedemikian itu disebabkan oleh penyediaan beras yang cukup melalui impor dan terutama sekali oleh produksi beras dalam negeri yang meningkat terus selama tahun 1968.

Perkembangan harga di dalam masa 1969-1970 nanti sudah tentu banyak dipengaruhi oleh perkembangan kredit perbankan, perkembangan neraca pembayaran dan pelaksanaan APBN 1969-1970 sendiri.

Pembahasan yang lebih terperinci mengenai hal-hal tersebut di atas dapat dibaca di dalam bagian-bagian yang bersangkutan dalam Nota Keuangan ini.

Tetapi satu hal sudah jelas, yaitu di dalam pelaksanaan APBN 1969-1970 perkembangan harga akan diusahakan lebih mantap lagi dan lebih rendah lagi daripada apa yang telah dicapai dalam tahun 1968.

2. Perkembangan Jumlah Uang Yang Beredar.

Pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang, kebijaksanaan kredit yang selektif dan terarah serta kebijaksanaan neraca pembayaran yang juga diarahkan telah memberikan pengaruh yang berlain-lainan terhadap perkembangan jumlah uang yang beredar. Mengenai hal ini dapat dibaca lebih lanjut di dalam bagian perkembangan kredit tentang sebab-sebab berambahnya uang yang beredar (lihat *Tabel 9*). Sejak tahun anggaran 1967 yang lalu APBN tidaklah lagi menjadi penyebab-utama dari pertambahan jumlah uang yang beredar; penyebab-utamanya adalah kredit perbankan.

Hal ini berarti bahwa pertambahan jumlah uang yang beredar telah menambah daya produksi masyarakat, sebab di dalam sektor perbankan telah dilaksanakan kebijaksanaan kredit yang selektif dan terarah. Perincian dan pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca dalam bagian perkembangan kredit dari Nota Keuangan ini.

3. Perkembangan ekspor dan impor.

Ekspor tahun 1967 sampai dengan bulan Oktober berjumlah US\$ 354,8 juta (di luar minyak). Angka sementara ekspor sampai dengan bulan Oktober 1968 menunjukkan bahwa jumlahnya telah mencapai US\$ 376,0 juta (di luar minyak).

Impor tahun 1967 sampai dengan bulan Oktober berjumlah US\$ 469,0 juta (di luar minyak). Angka sementara impor sampai dengan bulan Oktober 1968 berjumlah US\$ 553,4 juta (di luar minyak).

Mengenai ekspor dapat diperkirakan adanya kemungkinan peningkatannya, karena di dalam triwulan IV-1968 bagian devisa ekspor yang diperuntukkan dinaikkan dari 75% menjadi 86% dari devisa ekspor Golongan A. Ini berarti adanya rangsangan yang lebih besar untuk meningkatkan ekspor.

Mengenai impor dapat dijelaskan bahwa telah diadakan pengerahan yang lebih baik, sehingga hal ini turut pula memberi pengaruh terhadap kemantapan tingkat harga

pada umumnya. Sebagai gambaran umum bersama ini disertakan satu tabel tentang impor menurut golongan A, B, C, dan D (lihat *Tabel 3*). Dari tabel itu terlihat jelas bahwa kebijaksanaan pengurangan impor telah dilaksanakan secara lebih baik di dalam tahun 1968.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, maka perkiraan-perkiraan ekspor dan impor untuk masa APBN 1969-1970 telah memberikan harapan yang lebih baik. Dalam tahun 1969 ekspor (dengan minyak) diperkirakan dapat mencapai US\$ 953,0 juta, sedangkan impor (dengan minyak) diperkirakan dapat mencapai US\$ 956,0 juta.

Tabel 3.
IMPORT MENURUT GOLONGAN A,B,C DAN D
(Peraturan 28 Juli 1967)
(Di luar minyak : dalam US\$. 1000,- C & F)

I M P O R	1967		Jumlah	1968			Jumlah
	Triw.III	Triw. IV		Triw.I	Triw.II	Triw.III	
I KREDIT	72.730	63.366	136.096	44.465	33.236	61.297	138.998
Golongan A	20.569	25.390	45.939	30.422	21.091	39.078	90.591
Golongan B	41.394	33.678	75.072	12.788	12.086	21.877	46.751
Golongan C	9.972	3.277	13.249	935	0	17	952
Golongan D	795	1.021	1.816	320	59	325	304
II TUNAI	23.371	77.688	101.059	140.813	139.160	72.809	352.782
Golongan A	5.087	40.929	46.016	74.802	64.302	47.542	186.646
Golongan B	13.112	22.215	35.327	38.731	42.863	19.910	101.504
Golongan C	4.390	12.047	16.437	21.241	27.663	4.296	53.200
Golongan D	782	2.497	3.279	6.039	4.332	1.061	11.432
TUNAI DAN KREDIT	96.101	141.054	237.155	185.278	172.396	134.106	491.780
III DEvisa PELENGKAP	3.622	1.924	5.546	3.426	3.634	5.842	12.902
Golongan A	900	5	905	80	7	112	199
Golongan B	648	349	997	1.868	1.844	1.919	5.633
Golongan C	321	226	547	125	73	322	519
Golongan D	1.753	1.344	3.097	1.353	1.710	3.489	6.551

Sumber : BNI Bait 1

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 1968

Untuk sekedar memberikan gambaran, ada baiknya diperhatikan perkembangan APBN sejak tahun 1963 sampai tahun 1968 ini (lihat *Tabel 4*).

Sejak tahun 1963 s.d. tahun 1966 jumlah defisit APBN telah melebihi jumlah penerimaan negara. Dimasa lampau, rezim Orde Lama berusaha untuk mendapatkan bagian yang sebesar-besarnya dari produksi nasional melalui defisit APBN. Membesarnya penguasaan produksi nasional tersebut diperlukan dalam rangka pembiayaan aktivitas-aktivitas yang semakin meluas pada waktu itu baik dalam rangka pembiayaan proyek-proyek “*Nation and Character Building*” maupun dalam rangka proyek-proyek kemercusuaran lainnya. Pembelanjaan atas aktivitas non-ekonomis melalui defisit APBN (*deficit spending*) tersebut telah merupakan sumber utama daripada inflasi yang berkecamuk pada waktu itu dan yang masih kita rasakan efeknya hingga sekarang ini.

Dari *Tabel 4* tersebut dapat diketahui besarnya defisit-defisit APBN tersebut baik sebagai presentase dari penerimaan maupun sebagai presentase dari pengeluaran sejak tahun 1963 s.d. tahun 1966. Rata-rata presentase-presentase tersebut besarnya lebih dari 100% bila dibandingkan dengan penerimaan atau lebih dari 50% bila dibandingkan dengan pengeluaran.

Tetapi, sejak tahun 1967 dan sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XXIII/1966, defisit APBN tersebut secara drastis dapat ditekan sehingga tidaklah dapat dikatakan lagi bahwa defisit APBN merupakan penyebab-utama dari pada inflasi. Defisit APBN 1967 dapat ditekan hingga hanya merupakan rata-rata 4,6% dari pada penerimaan ataupun pengeluaran. Di dalam pelaksanaan APBN 1968 sampai dengan triwulan III 1968 hanya merupakan rata-rata 2,6% dari pada penerimaan ataupun pengeluaran.

Sebetulnya prinsip kebijaksanaan anggaran berimbang itu memberikan arti yang besar tidak hanya sebagai salah satu cara yang terbaik untuk membendung inflasi, tetapi juga sebagai suatu cara yang ampuh untuk mendisiplinkan seluruh aparatur-aparatur negara di dalam rangka kembali kepada “*single management*” atas perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan APBN.

Hal inilah yang memungkinkan tercapainya hasil-hasil yang positif seperti digambarkan di atas.

Pelaksanaan APBN untuk seluruh tahun anggaran 1968, berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan III-1968, kiranya tidak akan jauh menyimpang dari harapan-harapan dan hasil-hasil yang baik seperti yang telah disebutkan tadi.

Realisasi penerimaan negara sampai dengan triwulan III-1968 berjumlah Rp 118,4 milyar, dalam jumlah mana sebesar Rp 101,0 milyar adalah penerimaan rutin dan Rp 17,4 milyar adalah penerimaan pembangunan (tanpa ADO).

Diperkirakan bahwa untuk seluruh tahun 1968 penerimaan negara akan berjumlah Rp 185,2 milyar dalam jumlah mana termasuk Rp149,7 milyar sebagai penerimaan rutin dan Rp 35,5 milyar sebagai penerimaan pembangunan (tanpa ADO).

Diperkirakan bahwa untuk tahun 1968 ini Pemerintah dapat pula mempertahankan tingkat pengeluarannya dalam batas-batas penerimaan negara tersebut.

Di dalam **Tabel 5** diperincikan penerimaan negara yang diperkirakan dapat dihasilkan oleh APBN 1968.

Tabel 4
Ichisar Perkembangan APBN 1963 - 1968
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Surplus			Defisit		
			Jumlah	% dari Penerimaan	% dari Pengeluaran	Jumlah	% dari Penerimaan	% dari Pengeluaran
1963	162,2	329,8				167,6	100,4	50,84
1964	292,1	681,3				389,2	140,1	59,40
1965	924,4	1.859,1				934,7	101,1	50,27
1966	13.142,3	29.077,0				15.934,7	121,3	54,80
1967 ^{x)}	83,7	87,6				3,9	4,7	4,5
1968 ^{x)}	118,4	121,5				3,1	2,6	2,6
(s.d. Triw.III)								
Triwulan I	24,4	23,9	0,5	2,0	2,0			
Triwulan II	36,7	47,9				11,2	30,5	23,4
Triwulan III	57,3	49,7	7,6	13,3	15,3			

Sumber : Departemen Keuangan

^{x)} Angka-angka 1967 dan 1968 dalam milyar rupiah;
angka-angka 1967 juga merupakan angka-angka menurut perhitungan anggaran.

Tabel 5
Rencana Perubahan dan Tambahan Penerimaan Negara 1968
(dalam ribuan rupiah)

Jenis Penerimaan	Realisasi		Realisasi		Prognosa		Rencana Penerimaan	
	Triwulan I (1)	Triwulan II (2)	Triwulan III (3)	Triwulan IV (4)	Triwulan I (5)	Triwulan II (6)	Triwulan III (7)	Triwulan IV (8)
I Penerimaan Rutin :								
A. Pajak Langsung		21.272.378	33.006.898	46.730.189	48.687.500			149.696.965
1. Pajak Pendapatan		6.902.544	9.005.823	17.527.803	18.550.445			51.986.615
2. Pajak Perseroan		1.132.530	1.558.054	3.277.000	3.660.000			9.627.584
3. Pajak Perseroan Minyak		1.273.379	1.862.531	3.519.000	4.140.000			10.794.910
4. MPO 1)		3.798.137	4.275.919	8.955.803	8.557.945			25.587.804
5. Lain-lain 2)		653.943	1.237.022	1.715.000	2.092.500			5.698.465
		44.555	72.297	61.000	100.000			277.852
B. Pajak Tidak Langsung		14.218.840	22.295.645	28.372.386	27.073.000			91.959.871
1. Pajak Penjualan		1.365.271	1.858.901	2.475.000	2.700.000			8.399.172
2. Pajak Penjualan Impor		0	342.205	3.058.000	1.950.000			5.350.205
3. Cukai		2.296.865	3.755.355	4.620.000	5.963.000			16.635.220
4. Bea Masuk		6.625.052	10.203.893	10.168.000	10.900.000			37.896.945
5. Pajak Devisa Impor		3.324.797	4.095.888	3.784.674	1.560.000			12.765.359
6. Laba Bersih Minyak		0	1.203.000	3.050.712	3.200.000			7.453.712
7. Lain-lain 3)		606.855	836.403	1.216.000	800.000			3.459.258
C. Penerimaan Non tax		150.994	1.705.430	830.000	3.064.055			5.750.479
II Penerimaan Pembangunan (tanpa ADO)		3.101.384	3.715.980	10.601.704	18.106.000			35.525.068
Kredit Luar Negeri 4)		3.101.384	3.715.980	10.601.704	18.106.000			35.525.068
ADO 5)		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			P.M.
Jumlah (tanpa ADO)		24.373.762	36.722.878	57.331.893	66.793.500			185.222.033

SUMBER : Departemen Keuangan

- 1) Memungut Pajak Orang (MPO) adalah pungutan dimuka atas pajak pendapatan dan pajak perseroan, pungutan mana dilakukan melalui pihak ketiga.
- 2) Termasuk Pajak Kekayaan, Pajak Deviden dan lain-lain jenis Pajak yang tidak dapat dispesifikasikan.
- 3) Termasuk Bea Materai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Bea Lelang dan lain-lain jenis Pajak yang tidak dapat dispesifikasikan.
- 4) Tidak termasuk counterpart PL-480 dan impor pupuk dan Jepang.
- 5) Dipergunakan langsung oleh Daerah-daerah.

IV. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 1968-1970

A. Penerimaan Negara

1. Umum.

Perkiraan-perkiraan penerimaan Negara untuk APBN 1969-1970 didasarkan pada beberapa asumsi-asumsi umum sebagai berikut :

- (1) Perkembangan harga akan tetap diusahakan menuju stabilitas pada tingkat yang lebih mantap.
- (2) Tidak ada perubahan-perubahan yang prinsipil di bidang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk masa APBN 1969-1970.
- (3) Produksi atau panen dari produk-produk terpenting yang turut mempengaruhi penerimaan Negara, seperti : rokok, tembakau, dsb., memenuhi target yang ditentukan.
- (4) Tidak ada perkembangan-perkembangan menyolok di bidang situasi internasional yang dapat pula mempengaruhi ekonomi internasional kita di dalam masa APBN 1969-1970.

Berdasarkan asumsi-asumsi umum tersebut diperkirakan besarnya penerimaan-penerimaan untuk masing-masing jenis penerimaan dengan memperhitungkan pula asumsi-asumsi khusus yang menyangkut masing-masing jenis penerimaan. Perkiraan-perkiraan tersebut secara terperinci dapat dibaca di dalam bagian tersendiri yang dilampirkan bersama ini.

2. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

Seluruh pajak langsung untuk APBN 1969-1970 diperkirakan akan menghasilkan Rp 91,2 milyar, sedangkan seluruh pajak tidak langsung diperkirakan akan menghasilkan Rp 134,3 milyar. Ini berarti bahwa secara relatif hasil-hasil pajak langsung berjumlah 40% dari seluruh hasil-hasil pajak.

Tabel 6
Penerimaan Negara 1967 - 1969 - 1970 yang berasal dari Pajak
(dalam milyar Rp.)

Jenis Pajak	1967 Realisasi		1968 Sementara		Triwulan I-1969 Perkiraan		1969-1970 Perkiraan	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Pajak Langsung *)	15,1	26	52,0	36	16,4	36	91,2	40
Pajak Tidak Langsung	42,0	74	92,0	64	28,7	64	134,3	60
Jumlah	57,1	100	144,0	100	45,1	100	225,5	100

Sumber : Departemen Keuangan R.I.

*) Tidak termasuk IPEDA

Dari tabel di atas terlihat bahwa bagian relatif dari pajak-pajak langsung mulai meningkat. Perbandingan yang didapat untuk triwulan I-1969 sebetulnya harus kita nilai dalam pengertian bahwa di dalam triwulan I dari tiap-tiap tahun memang penerimaan pajak-pajak langsung belum begitu meningkat, sehingga presentase yang sama dengan seluruh tahun 1968 (presentase sementara), yaitu pajak langsung sama-sama merupakan 36% dari seluruh pajak, sudah merupakan perkembangan yang baik.

Dari angka-angka di dalam tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan serta pelaksanaan pemungutan penerimaan negara, terutama melalui sistim MPO dan MPS dapat meningkatkan penerimaan negara. Karena hal ini terutama mengenai pajak-pajak langsung, maka ini suatu pertanda dari keadaan yang makin maju dari perekonomian dan administrasi negara.

3. Penerimaan Non-tax.

Jenis penerimaan ini tidak dapat dikatakan mengikuti trend tertentu, sebab sebagian dari padanya merupakan apa yang dinamakan “*administrative revenues*” (seperti : denda-denda administratif, biaya-biaya administratif di dalam memberikan service kepada umum, penagihan piutang-piutang negara dsb.) dan sebagian lagi adalah penerimaan-penerimaan sebagai akibat penyertaan Pemerintah di dalam “aktivitas business” (seperti : deviden dari bank Sentral dan Bank-Bank pemerintah lainnya, Laba PN dsb.).

Berhubung dengan itu Pemerintah memperkirakan penerimaan non-tax sebesar Rp 2,5 milyar.

4. Penerimaan Pembangunan.

Penerimaan ini tergantung kepada persediaan kredit luar negeri dan bantuan-bantuan luar negeri lainnya yang menghasilkan nilai-lawan rupiah bagi negara. Dari persediaan yang ada sudah tentu Pemerintah mengharapakan bahwa semuanya dapat dijual atau direalisasikan.

Dengan pengertian demikian maka Pemerintah memperkirakan bahwa BE Kredit dan PL-480 akan menghasilkan nilai-lawan rupiah sebesar Rp 63,2 milyar, sedangkan *Project Aid* akan menghasilkan Rp 36,2 milyar.

Perlu diterangkan bahwa *Project Aid* dalam hal ini merupakan kredit yang diteruskan kepada departemen-departemen dalam bentuk proyek-proyek dan di dalam APBN hanya dicantumkan nilai rupiahnya saja.

Dapat dijelaskan bahwa seluruh hasil penerimaan pembangunan ini akan dipergunakan bagi membiayai REPELITA untuk sektor Pemerintah, di samping bagian yang disisihkan dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp.24,0 milyar seperti telah disebutkan di atas.

B. Pengeluaran Negara

1. Anggaran Rutin.

Bila ditelaah kembali kebijaksanaan yang dipergunakan sebagai landasan pokok untuk menyusun RAPBN triwulan I-1969, maka nada pokok dari kebijaksanaan Umum dalam RAPBN triwulan I-1969 itu adalah persiapan untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima tahun dengan mengutamakan pengendalian inflasi sebagai usaha stabilitas/rehabilitas ekonomi.

Di dalam pelaksanaan APBN 1969-1970 sebagai permulaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun, maka setidak-tidaknya keadaan ekonomi moneter yang telah tercapai dalam tahun 1968 dan triwulan I-1969 jangan sampai menurun kembali, bahkan harus diusahakan untuk disempurnakan secara terus menerus. Dengan demikian maka pengendalian inflasi dan stabilisasi ekonomi merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Peningkatan penerimaan secara maksimal di samping pengendalian pengeluaran rutin secara sungguh-sungguh agar setiap pengeluaran rutin yang memungkinkan kegoncangan keseimbangan moneter dapat dihindarkan, adalah syarat mutlak. Selanjutnya pola pengeluaran rutin harus ditujukan pula pada pembangunan sehingga pada hakekatnya pengeluaran rutin diadakan untuk memungkinkan dan menunjang pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu sejauh mungkin mengingat kemampuan pembiayaan negara, prakondisi-prakondisi yang perlu diadakan dalam bidang rutin akan dipenuhi.

Pra-kondisi operasional, misalnya biaya pemeliharaan peralatan Pemerintah di samping belanja barang lainnya, pra-kondisi dalam bidang penata-usahaan sebagai unsur penting dalam melaksanakan pengawasan dan pertanggungjawaban dsb., sejauh mungkin diusahakan disempurnakan agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

Pembayaran kembali hutang, terutama hutang luar negeri, disesuaikan dengan hasil-hasil yang tercapai dalam sidang-sidang internasional mengenai *rescheduling* yang diadakan secara multi-lateral maupun bi-lateral.

Khusus mengenai biaya pemakaian bahan bakar perlu dikemukakan bahwa dalam tahun-tahun yang lalu hal ini tidak dimasukkan dalam anggaran rutin maupun pembangunan tetapi diseimbangkan dengan pendapatan dalam bidang perminyakan. Mengingat prinsip pengelolaan tunggal (*single-management*) keuangan negara, maka tahun anggaran 1969/1970 ini pengeluaran untuk bahan bakar (minyak) dimasukkan dalam anggaran belanja.

Mengenai pengeluaran untuk AB.I, khususnya dalam bidang operasi keamanan, mendapatkan perhatian di dalam rangka ke-empat dari tugas pokok kabinet Pembangunan. Artinya usaha-usaha pengembalian ketertiban merupakan program nasional sebagaimana juga tugas-tugas pokok lainnya dari kabinet Pembangunan dan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pengeluaran rutin dengan devisa seberapa boleh dikurangi agar dengan demikian dapat dialihkan penggunaannya untuk keperluan pembangunan atau untuk keperluan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Jelaslah bahwa pengeluaran di bidang rutin harus diusahakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan obyektif bahwa ada kemungkinan untuk menyisihkan pendapatan negara untuk keperluan pembangunan.

Anggaran Belanja Rutin dalam tahun 1969-1970 memberikan gambaran sbb. :

Tabel 7
Anggaran Rutin 1969/1970
(dalam jutaan Rp)

Uraian	Jumlah
1. Belanja Pegawai/Pensiun	93.408
a. Tunjangan Beras.	38.476
b. Gaji/Upah/Pensiun	48.464
c. Lain-lain Belanja Pegawai	2.040
d. Belanja pegawai luar negeri	4.428
2. Belanja Barang	50.524
a. Uang makan/lauk-pauk	13.801
b. Belanja barang dalam negeri	27.539
c. Belanja barang luar negeri	9.184
3. Subsidi/Perimbangan Keuangan.	41.412
a. Irian Barat	8.000
b. Lain-lain Daerah Otonom	33.412
4. Bunga/Cicilan Hutang.	16.500
a. Dalam Negeri	1.000
b. Luar Negeri	15.500
5. Lain-lain Pengeluaran Rutin	2.200
a. Persiapan Pemilu	1.000
b. Subsidi haji, dsb.	1.200
Jumlah 1 s.d. 5	204.044

Dalam memperkirakan pengeluaran belanja pegawai untuk tahun 1969-1970 dasar yang digunakan adalah anggaran peralihan tahun 1969.

Jumlah gaji yang diterima telah disesuaikan dengan PGPS-1968. Di samping itu para pegawai untuk golongan II, III dan IV PGPS-1968 masih tetap menerima beras, hanya kepada mereka diharuskan membayar sebagian harga beras seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu setinggi-tingginya Rp 20,- per kilogram.

Pengeluaran untuk uang makan diperkirakan 4 kali triwulan pertama tahun 1969. Dalam pengeluaran untuk belanja barang lainnya tercakup a.l. :

- keperluan sehari-hari untuk melancarkan kegiatan Pemerintah,
- biaya pemeliharaan,
- biaya perjalanan dinas dalam/luar negeri.

Untuk Bunga/cicilan Hutang disediakan kredit sebesar Rp 16.500 juta. Di dalam jumlah tersebut telah disediakan pula pelunasan hutang-hutang kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bidang perminyakan. Selanjutnya lain-lain pengeluaran rutin adalah sebesar Rp 2.200 juta termasuk biaya persiapan Pemilihan Umum dan Subsidi haji.

Adapun perincian lebih lanjut dari Anggaran Rutin 1969/1970 dapat dibaca pada lampiran yang disertakan bersama ini.

2. Anggaran Pembangunan.

Pegangan pokok Pemerintah dalam menyusun Anggaran Pembangunan adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun yang diolah Bappenas bersama-sama dengan Departemen-departemen.

Dasar yang dipergunakan untuk menentukan prioritas adalah ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang membahas soal pembangunan, terutama ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara No...../....., dengan memperhitungkan kondisi-kondisi obyektif yang dimiliki. Sasaran pengeluaran pembangunan diprioritaskan pada :

1. Peningkatan Produksi Pertanian, khususnya produksi beras dan hasil Perkebunan untuk ekspor.
2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas prasarana.
3. Perbaikan dan peningkatan barang-barang industri yang menunjang sektor pertanian dan menghemat devisa.
4. Perbaikan dan Peningkatan produksi hasil-hasil pertambangan.

5. Pembangunan di bidang sosial.

Peningkatan produksi pertanian di bidang beras ingin dicapai melalui peningkatan penggunaan pupuk, obat-obatan, bibit unggul, irigasi dan penyuluhan serta kebijaksanaan harga beras yang merangsang produksi. Sedangkan peningkatan produksi pertanian di bidang perkebunan ingin dicapai melalui peremajaan tanaman, pemupukan dan perbaikan pengolahan hasil perkebunan.

Sasaran dalam bidang prasarana terutama ditujukan pada perhubungan darat yang meliputi perbaikan berat jalan-jalan ekonomi, alat angkutan jalan dan kereta api. Tidak pula dilupakan perhubungan laut, perhubungan udara dan telekomunikasi sebagai sarana utama dalam memperbaiki ekonomi rakyat di samping tugasnya dalam bidang *public services*.

Di bidang industri, melalui rehabilitasi, perluasan maupun pembangunan baru secara selektif, sasaran terutama diarahkan kepada :

- a. Industri pupuk untuk sejauh mungkin memenuhi kebutuhan penting tersebut, khususnya yang mendasarkan atas bahan baku, gas alam dan minyak bumi (*Hitrogen base*).
- b. Industri semen dengan peningkatan sedikit-dikitnya dua kali lipat, untuk menghadapi kebutuhan yang meningkat.
- c. Industri tekstil agar diusahakan mencapai 900 juta meter setahun pada akhir periode pembangunan lima tahun.
- d. Industri kertas supaya tidak sangat tergantung dari luar negeri.
- e. Pabrik-pabrik logam, mesin dan peralatan, dengan memperhatikan *spayers*, penggilingan padai, pompa air dan sebagainya.

Sasaran dalam bidang pertambangan adalah perbaikan dan peningkatan produksi khususnya tambang timah dan minyak bumi.

Di dalam bidang sosial maka sasaran ditujukan kepada peningkatan keahlian dan ketrampilan serta pembinaan sosial pada umumnya.

Segala sesuatu tersebut di atas sudah barang tentu dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan pembiayaan negara. Disamping itu dikerahkan pula kemampuan masyarakat yang mempunyai potensi sangat besar dan juga diusahakan melalui penanaman modal asing.

Pembangunan dalam bidang Pertahanan Keamanan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan negara pada keseluruhannya. Namun demikian pembangunan secara fisik militer pada waktu ini belum dilaksanakan secara luas. Yang sudah jelas ialah bahwa

tenaga manusia maupun tenaga materiil yang telah terhimpun dapat dimanfaatkan dengan melaksanakan operasi-operasi dharma.

Akhirnya perlulah diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahap pertama ini tujuan utama adalah peningkatan produksi nasional dan pendapatan nasional, yang dengan sendirinya dengan peningkatan ini langsung atau tidak langsung akan dapat memperluas kesempatan dan pengembangan kesejahteraan rakyat serta mental spiritual bangsa.

Pengeluaran pembangunan bersumber pada tiga pokok :

1. Nilai-lawan Kredit Luar Negeri	Rp 63,2 milyar
2. Nilai-lawan Bantuan Proyek/Bantuan tehnis	Rp 36,2 milyar
3. Surplus Rutin	<u>Rp 24,0 milyar</u>
Jumlah	Rp 123,4 milyar

Karena seluruh sumber pembiayaan pembangunan ini diperuntukkan bagi melaksanakan proyek-proyek pembangunan sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun untuk anggaran 1969-1970, maka sebagian terbesar akan diarahkan pada proyek-proyek pertanian, pengairan, prasarana dan industri yang semuanya merupakan unsur-unsur penunjang bagi sektor pertanian. Perincian lebih lanjut mengenai anggaran pembangunan ini berserta program-program yang hendak dilaksanakan dimuat di dalam lampiran tersendiri yang disertakan bersama Nota Keuangan ini.

Sistimatika APBN 1969/1970.

Sistimatika anggaran yang hingga kini dipergunakan dirasakan kurang dapat menggambarkan apa yang dikandung maksud dalam anggaran itu sendiri, terutama dalam bidang Anggaran Pembangunan.

Dengan sistimatika yang dipergunakan sampai sekarang pada hakekatnya anggaran terutama dipergunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dipergunakan oleh Pemerintah guna keperluan pembiayaan rencana kerjanya.

Dengan menjunjung tinggi atas pertanggung jawaban tersebut di atas, maka di samping itu anggaran harus dapat dipergunakan sebagai alat pengukur pelaksanaan secara fisik dari pembangunan-pembangunan yang sedang dilaksanakan dan sekaligus sebagai alat pengelolaan dan pengawasan keuangan negara.

Sekali lagi, Pemerintah dengan sistematika ini tidak mengeluarkan pertanggung jawaban bahkan memberikan kepada badan-badan legislatif suatu alat pengukur dan alat pengawas dari pelaksanaan program-program Pemerintah secara menyeluruh.

Pembangunan tahun 1969/1970 berorientasikan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun yang akan dilaksanakan mulai tahun anggaran yang bersangkutan.

Di samping itu juga diusahakan untuk menyusun sistematika anggaran yang dimaksudkan sebagai langkah permulaan dalam persiapan menuju ke arah *performance budgeting* melalui *planning*, *programming*, dan *budgeting*. Untuk itu, maka anggaran pembangunan telah dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang-bidang ekonomi, sosial dan umum. Bidang-bidang ini kemudian dibagi lagi menurut sektor-sektor, masing-masing sektor dibagi menurut sub-sektor, tiap sub-sektor dibagi lagi di dalam program-program dan masing-masing program dibagi dalam proyek-proyek.

Juga di dalam anggaran pembangunan, semua bantuan proyek (*project aid*) dimasukkan dalam anggaran sebagai kredit yang diteruskan (*doorgetrokken credit*).

Bantuan ini adalah dalam bentuk proyek dan dicantumkannya di dalam anggaran pembangunan merupakan pencerminan nilai rupiahnya saja.

V. PERKEMBANGAN HARGA, UANG BEREDAR DAN KREDIT PERBANKAN

A. Perkembangan Harga

Sejak awal Januari 1968 sampai dengan akhir Nopember 1968 angka indeks biaya hidup telah menunjukkan kenaikan rata-rata 7,17% per bulan. Tingkat kenaikan rata-rata indeks biaya hidup selama sebelas bulan pertama 1968 adalah lebih rendah dari pada tahun 1967 (rata-rata per bulan 9%) dan tahun 1966 (rata-rata per bulan 53%).

Dalam tahun 1968 kenaikan tertinggi indeks biaya hidup itu telah terjadi dalam bulan Januari, sebagai akibat suasana Lebaran/tahun Baru yaitu sebesar $\pm 40\%$. Jika dilihat keadaan bulan Juli sampai dengan Nopember 1968 (periode di luar bulan-bulan Lebaran/Tahun Baru) maka tingkat kenaikan indeks tersebut rata-rata tiap bulan hanya 2,22%.

Angka ini menurun dari angka 8,55% pada tahun 1967 untuk periode Semester ke-II, yang berarti suatu penurunan sebesar $\pm 74\%$. Apalagi jika dibandingkan dengan angka indeks rata-rata 1966 dan 1965 yang jauh lebih tinggi.

Jika trend penurunan harga ini diikuti, maka akan diusahakan agar indeks biaya hidup pada periode 1969-1970 lebih rendah lagi.

Kenaikan indeks biaya hidup yang menyolok pada bulan Januari 1968 terutama disebabkan karena kenaikan indeks harga beras yang menyolok pada bulan tersebut, yaitu sebesar 73,07% di atas indeks Desember 1967. Tetapi sejak bulan Februari sampai Oktober 1968 indeks harga ini menunjukkan trend menurun, atau rata-rata sebesar 2,4% setiap bulannya, yakni hampir sejajar dengan perkembangan indeks biaya hidup dalam periode yang sama tahun 1968. Angka rata-rata kenaikan indeks harga beras selama bulan-bulan Januari sampai dengan Oktober 1968 menunjukkan 5,07%. Angka kenaikan rata-rata ini adalah lebih rendah dari tahun 1967 (14,12%) dan tahun 1966 (11,76%).

Tabel 8
Indeks Biaya Hidup dan Indeks Harga Beras Eceran, 1966-1968

M A S A	BIAYA HIDUP	BERAS
	Indeks Okt. 1966-100	Indeks Okt. 1966-100
Kenaikan rata-rata bulan 1966 *)	+ 53,00	+ 16,00 **)
1967 :		
Januari	112,26	157,41
Februari	146,07	199,39
Maret	151,55	204,67
April	152,54	199,39
Mei	152,22	167,91
Juni	157,08	178,40
Juli	160,26	194,14
Agustus	168,86	225,62
September	186,43	314,82
Oktober	199,83	388,28
Nopember	241,45	577,17
Desember	237,64	545,69
Kenaikan rata-rata bulanan 1967 *)	+ 9,00	+ 23,00
1968 :		
Januari	332,24	944,47
Februari	362,93	1.049,41
Maret	374,25	996,94
April	352,25	734,59
Mei	372,85	755,57
Juni	382,59	755,58
Juli	398,97	818,54
Agustus	413,76	797,55
September	414,80	734,59
Oktober	409,82	713,60
Nopember	424,98	...
Kenaikan rata-rata bulanan 1968 *)	+ 7,00	+ 3,00

SUMBER : BPS dan Laporan Angka-angka Mingguan BNI Unit I
diolah kembali oleh Departemen Keuangan

*) Angka rata-rata kenaikan per bulan atas dasar Desember ke Desember.

**) Hanya angka perkiraan saja.

B. Perkembangan Jumlah uang Beredar

- (a) Selama awal Januari sampai dengan bulan Oktober 1968 uang beredar bertambah sebesar Rp 46,4 milyar atau 89,6%. Tingkat pertambahan jumlah uang per bulan selama periode tersebut adalah 6,8 % pada periode yang sama dalam tahun 1967 jumlah uang beredar bertambah sebesar Rp 22,6 milyar atau tingkat pertambahan per bulan adalah sebesar 6,7 %. Sejak akhir Oktober sampai dengan akhir Desember 1968 jumlah uang beredar diperkirakan akan bertambah hingga mencapai posisi \pm Rp 110,0 milyar pada akhir Desember 1968. Jika dibandingkan tingkat kenaikan harga sejak akhir Desember 1967 sampai dengan akhir Oktober 1968 (61,7 %) dengan kenaikan jumlah uang beredar (89,6 %) ternyata bahwa tingkat kenaikan jumlah uang beredar lebih tinggi dari pada tingkat kenaikan harga dalam periode yang sama. Hal ini berarti bahwa kecepatan uang beredar (*velocity*) telah menunjukkan tendensi yang menurun. Dengan perkataan lain tendens itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak berusaha cenderung untuk mentransfer uangnya ke dalam bentuk barang-barang sebagaimana terjadi pada tahun-tahun yang lalu, terutama dalam tahun 1966.
- (b) Salah satu cara lagi untuk mengetahui apakah masyarakat bertambah kepercayaannya pada mata uangnya sendiri adalah melalui jumlah simpanan-simpanan masyarakat pada perbankan, misalnya : deposito berjangka. Dengan Instruksi Presiden No.28/1968 ditetapkan perubahan-perubahan pada suku bunga, termasuk suku bunga untuk deposito berjangka, yaitu bila deposito berjangka kurang dari 3 bulan mendapatkan bunga 1,5% per bulan, bila 6 bulan 5% per bulan, bila 1 tahun 6% per bulan dan ada beberapa ketentuan lainnya. Ternyata sejak dimulainya proyek deposito berjangka ini pada permulaan Oktober 1968 sampai pada akhir Nopember 1968 telah masuk pada bank-bank Pemerintah deposito berjangka kira-kira Rp 3,1 milyar. Deposito berjangka ini sudah tentu merupakan pula salah satu sumber pembiayaan REPELITA, walaupun sifatnya non budgeter. Meningkatnya jumlah deposito berjangka ini sangat penting bagi pembiayaan REPELITA dan ini hanya bisa terjadi bila kepercayaan masyarakat terhadap rupiah bertambah.

Tabel 9
Jumlah Uang Beredar dan Sebab-Sebab Perubahannya
(dalam jutaan Rp baru)

		Resmi	Perusahaan	Luar Negeri	Lainnya	Mutasi	Jumlah					
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Posisi					
1963	Des	+	122,9	+	43,1	-	11,9	-	12,2	+	141,9	277,8
1964	Des	+	361,7	+	122,7	-	11,6	-	25,2	+	447,6	725,4
1965	Maret	+	123,0	+	37,9	-	2,0	-	32,6	+	126,3	851,7
	Juni	+	150,9	+	158,9	+	20,8	-	45,8	+	264,3	1.116,0
	September	+	383,5	+	228,8	+	20,0	-	79,5	+	552,8	1.668,8
	Desember	+	597,8	+	268,9	+	24,1	+	51,3	+	922,1	2.590,9
Kumulatif 1965 :		+	1.255,2	+	694,5	+	22,4	-	106,6	+	1.865,5	
1966	Januari											
	Februari											
	Maret	+	1.197,2	+	1.190,2	+	57,4	+	734,8	+	3.179,8	5.770,7
	April											
	Mei											
	Juni	+	3.709,8	+	1.227,6	+	72,5	-	108,9	+	4.901,0	10.671,7
	Juli											
	Agustus											
	September	+	2.317,0	+	1.473,5	-	30,2	+	906,3	+	4.666,6	15.338,3
	Oktober											
Nopember												
Desember	+	4.820,2	+	1.638,1	-	160,3	+	990,1	+	7.288,1	22.626,4	
Kumulatif 1966		+	12.044,2	+	5.529,4	-	60,4	+	2.522,3	+	20.035,5	
1967	Januari	+	1.854,4	-	261,9	-	116,9	-	1.304,0	+	405,5	23.031,9
	Februari	+	394,7	+	346,7	+	162,1	+	35,0	+	614,3	23.646,2
	Maret	+	1.382,5	+	1.034,1	+	60,0	-	1.505,6	+	971,0	24.617,2
	April	+	169,4	+	1.199,4	+	71,9	+	1.003,6	+	2.444,3	27.061,5
	Mei	+	3.966,3	+	1.381,5	+	214,2	-	1.839,7	+	3.722,3	30.783,8
	Juni	+	362,6	+	1.562,6	+	7,1	+	273,8	+	2.206,1	32.989,9
	Juli	+	1.065,0	+	1.695,2	+	20,2	+	528,0	+	3.308,4	36.296,3
	Agustus	-	323,2	+	2.769,8	-	157,1	-	357,0	+	2.246,7	38.545,0
	September	-	1.388,7	+	856,4	-	35,3	+	1.199,3	+	631,7	39.176,7
	Oktober	+	950,5	-	524,9	-	191,1	+	3.308,9	+	3.714,5	42.891,2
	Nopember	-	578,4	+	2.776,6	-	1.262,2	+	5.502,5	+	2.599,6	45.490,8
	Desember	+	5.723,2	+	4.037,2	-	1.023,3	-	2.269,8	+	6.228,4	51.719,2
	Kumulatif 1967 :		+	13.578,3	+	16.872,8	-	1.023,3	-	335,0	+	29.092,8
1968	Januari	-	178,6	+	1.668,5	+	2.083,8	+	1.941,0	+	5.514,7	57.233,9
	Februari	+	3.474,4	-	1.022,4	+	3.204,9	-	848,3	+	4.808,6	62.042,5
	Maret	-	3.456,2	+	1.531,6	-	1.449,1	+	5.413,4	+	2.039,7	64.082,2
	April	+	7.284,4	+	1.482,1	+	232,9	-	2.950,2	+	6.049,2	70.131,4
	Mei	+	5.676,1	+	2.862,8	-	5.558,2	+	6.117,3	+	9.098,0	79.229,4
	Juni	+	1.443,8	+	13.037,7	+	5.445,9	-	11.259,8	+	8.667,6	87.897,0
	Juli	-	1.434,1	+	14.215,8	+	7.509,9	-	15.442,7	+	4.848,9	92.745,9
	Agustus	-	803,0	+	15.710,4	-	2.645,5	-	13.208,8	-	946,9	91.799,0
	September ¹⁾	-	5.781,0	+	10.902,4	-	2.617,7	+	283,6	+	2.787,3	94.586,3
	Oktober ¹⁾	-	2.138,7	+	9.599,0	+	7.257,0	-	11.393,2	+	3.324,1	97.910,4
Kumulatif 1968 :		+	4.087,1	+	69.987,9	+	13.463,9	-	41.347,7	+	46.191,2	

SUMBER : Laporan Angka-angka Mingguan BNI Unit I
Diolah kembali oleh Departemen Keuangan
¹⁾ Angka-angka sementara

C. Perkembangan Perkreditan Bank.

a. Kebijakan perkreditan 1968.

Pada azasnya kebijakan perkreditan pemerintah dewasa ini masih tetap berlandaskan pada kebijakan perkreditan yang selektif dan terarah. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan yang dijalankan secara bertahap sesuai dengan gerak irama roda perekonomian yang sedang ditujukan kepada keadaan rehabilitasi stabilisasi sebagai landasan pembangunan ekonomi.

Dalam rangka mendorong impor dengan B.E. Kredit sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. No. 31 tanggal 27 Januari 1968, maka telah diadakan perubahan-perubahan yang berkenaan dengan pembiayaan impor dengan B.E. Kredit.

Pada perubahan terakhir yang terjadi pada tanggal 5 Nopember 1968 telah ditetapkan bahwa untuk barang-barang golongan A pemberian kredit yang dapat dipertimbangkan maksimal 60% dari nilai lawan B.E. Kredit, sedangkan bagi barang-barang golongan B adalah 50% (kecuali impor dari USA). Selain dari pada itu ditetapkan pula jangka waktu kredit adalah dua bulan.

Di bidang ekspor telah pula diadakan penyempurnaan yang berkenaan dengan pengawasan dan syarat pemberian kredit, agar supaya lebih terarah dan dapat mencapai sasarannya sesuai dengan tujuan pemberian kredit tersebut.

Dalam usaha untuk menstabilkan harga pangan terutama beras, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 272/1967 dan Instruksi Presiden No.1/1968 telah disediakan kredit pengadaan beras, kredit untuk pembelian pupuk, Sprayers, intektisida dan sebagainya, dalam usaha peningkatan produksi pangan tersebut.

Selain daripada itu telah pula di-introdukir struktur suku bunga yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi berdasarkan Instruksi Presiden No.28/1968 tanggal 19 September 1968 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1968 dan yang oleh BNI Unit I telah dikeluarkan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut :

Golongan I – 3% sebulan :

- 1). Produksi dan distribusi 9 bahan pokok.
- 2). Kredit produksi kepada pertekstilan.
- 3). Kredit produksi bahan ekspor.
- 4). Kredit kepada Pemerintah Daerah dengan jaminan ADO untuk usaha pembangunan.

Golongan II – 4% sebulan :

- 1). Ekspor tidak termasuk *opkook*.
- 2). Pengangkutan untuk kepentingan umum dan industri alat pengangkutan umum.
- 3). Peternakan, pertanian, perikanan dan produksi bahan pangan lainnya.
- 4). Produksi/industri obat-obatan.
- 5). Produksi/industri kertas dan industri kerajinan.

Golongan III – 5% sebulan :

- 1). Produksi dan industri lainnya yang tidak termasuk dalam golongan I dan II;
- 2). Ekspor dengan Kredit *opkoop*.

Golongan IV – di atas 5% sampai 7% sebulan :

Perdagangan/distribusi di luar 9 bahan pokok dengan jasa-jasa lainnya yang tidak disebut dalam golongan I, II, dan III di atas.

Dari **Tabel 10** terlihat bahwa volume kredit perbankan dalam tahun 1968 menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat. Sampai akhir bulan Oktober 1968 pemberian kredit menunjukkan posisi sebesar Rp 110,9 milyar.

Jika dibandingkan dengan posisi akhir 1967, yaitu Rp 31,2 milyar, maka selama tahun 1968 telah terjadi kenaikan kredit perbankan sebesar Rp 79,7 milyar.

Tabel 10
Perkembangan Kredit Perbankan 1968
(dalam jutaan Rp.)

Akhir masa	Bank Sentral	Bank-bank Umum Pemerintah Lainnya	Jumlah	Bank Swasta	Jumlah Besar
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)
1967					
Desember	17.171,74	9.342,96	26.514,70	4.680,79	31.195,49
Produksi	7.828,52	4.511,48	12.440,00	1.553,09	13.993,09
Ekspor	573,50	2.874,77	3.448,27	1.425,64	4.873,91
Lain-lain	8.669,72	1.956,71	10.626,43	1.702,06	12.328,49
1968					
Triwulan I	18.616,84	13.110,24	31.727,08	5.283,52	37.010,60
Produksi	10.252,89	6.205,55	16.458,44	1.637,74	18.096,18
Ekspor	1.669,75	4.250,47	5.920,22	1.081,52	7.001,74
Lain-lain	6.694,20	2.654,22	9.348,42	2.564,26	11.912,68
Triwulan II	38.263,80	16.995,61	55.259,41	5.186,46	60.445,87
Produksi	15.212,65	8.052,95	23.265,60	1.362,62	24.628,22
Ekspor	2.466,79	5.644,63	8.111,42	430,45	8.541,87
Lain-lain	20.584,36	3.298,03	23.882,39	3.393,39	27.275,78
Triwulan III	70.762,01	21.016,36	91.778,37	8.372,03	100.150,40
Produksi	26.460,50	10.969,40	37.429,90	2.176,72	39.606,62
Ekspor	3.187,58	5.870,47	9.058,05	753,48	9.811,53
Lain-lain	41.113,93	4.176,49	45.290,42	5.441,83	50.732,25
Oktober	80.365,11	21.727,87	102.092,98	8.790,63	110.883,61
Produksi	27.796,94	11.460,50	39.257,44	2.285,42	41.542,86
Ekspor	3.504,74	6.675,03	10.179,77	792,11	10.971,88
Lain-lain	49.063,43	3.591,34	52.654,77	5.714,10	58.368,87

Sumber : BNI Unit I.
Diolah kembali oleh Departemen Keuangan.

b. Perkembangan Perkreditan menurut Sektor Perbankan dan Sektor Pemerintah dan Swasta.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa kredit perbankan pada akhir Oktober 1968 telah mencapai posisi Rp 110,9 milyar, dengan perincian :

Bank-bank Pemerintah : Rp. 102,1 milyar
Bank Swasta : Rp. 8,8 milyar

Jika dibandingkan dengan akhir tahun 1967 yang menunjukkan posisi sebagai berikut :

Bank-bank Pemerintah : Rp. 26,5 milyar
Bank-bank Swasta : Rp. 4,7 milyar

maka selama tahun 1968 telah terjadi kenaikan kredit perbankan sebagai berikut :

Bank-bank Pemerintah : + Rp. 75,6 milyar
Bank-bank Swasta : + Rp. 4,1 milyar

Adapun kenaikan kredit sebesar Rp. 79,7 milyar tersebut di atas terutama berasal dari kenaikan Bank Sentral :

akhir 1967 : Rp. 17,2 milyar
akhir Oktober 1968 : Rp. 80,4 milyar
pertambahan sebesar : Rp. 63,2 milyar.

Pertambahan kredit Bank Sentral sebesar Rp. 63,2 milyar itu terutama disebabkan kenaikan pemberian kredit untuk pengadaan pangan dan produksi pangan.

Kenaikan pemberian kredit Bank-bank Umum Pemerintah lainnya dapat dilihat dari pembiayaan sebagai berikut :

Akhir 1967 : Rp. 9,3 milyar
Akhir Oktober 1968 : Rp. 21,7 milyar
pertambahan sebesar : Rp. 12,4 milyar

Kenaikan pemberian kredit bank-bank umum Pemerintah lainnya ini dimungkinkan oleh meningkatnya dana kredit, terutama berupa giro dan deposito pada Bank-bank tersebut.

Pertambahan pemberian kredit Bank-bank Swasta sampai akhir bulan Oktober 1968, tidak memperlihatkan penambahan yang berarti dibandingkan dengan akhir tahun 1967 yaitu sebesar Rp. 4,1 milyar.

Pemberian kredit perbankan menurut sektor-sektor Pemerintah dan swasta pada akhir tahun 1967 adalah sebagai berikut :

Sektor Pemerintah	: Rp. 17,3 milyar
Sektor Swasta	: <u>Rp. 13,9 milyar</u>
Jumlah	: Rp. 31,2 milyar.

Jika data tersebut dibandingkan dengan data pada akhir bulan Oktober 1968, maka pemberian kredit perbankan menurut kedua sektor telah mengalami kenaikan sehingga posisinya menjadi sebagai berikut :

Sektor Pemerintah	: Rp. 72, 8 milyar
Sektor Swasta	: <u>Rp. 38, 1 milyar</u>
Jumlah	: Rp.110,9 milyar.

Naiknya alokasi kredit perbankan untuk sektor swasta antara lain disebabkan oleh kenaikan kredit langsung Bank Sentral sebesar Rp. 2,3 milyar dan kenaikan kredit likwiditas Bank sentral sebesar Rp. 6,8 milyar.

c. Pemberian Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi.

Dari *Tabel 10* dapat diikuti perkembangan kredit menurut sektor ekonomi sampai akhir Oktober 1968.

(a) Pemberian kredit-kredit oleh bank-bank pemerintah (termasuk bank Sentral) menurut sektor-sektor ekonomi pada akhir Oktober 1968 adalah sebagai berikut. (posisi) :

Produksi	: Rp. 39,3 milyar
Ekspor	: Rp. 10,2 milyar
Lain-lain	: Rp. 52,6 milyar

Jika angka-angka di atas dibandingkan dengan akhir Desember 1967, maka pemberian kredit bank-bank Pemerintah menurut sektor ekonomi telah mengalami kenaikan sebagai berikut :

Produksi	: + Rp. 28,9 milyar (215,6 %)
Ekspor	: + Rp. 6,8 milyar (195,2 %)
Lain-lain	: + Rp. 42,0 milyar (395,4 %)

Dari angka kenaikan kredit tersebut, ternyata baik secara absolut maupun relatif semua sektor telah mengalami kenaikan yang cukup besar.

(b) Alokasi kredit Bank-bank Umum Swasta menurut sektor ekonomi sejak akhir Desember 1967 sampai akhir bulan Oktober 1968 adalah sebagai berikut :

Produksi : + Rp. 0,8 milyar
 Ekspor : - Rp. 0,6 milyar
 Lain-lain : + Rp.4,0 milyar

(c) Pengarahan kredit selama tahun 1967 dan selama tiga kwartal 1968 adalah sebagai berikut :

Bidang	1967	1968		
		I	II	III
Produksi	44,8 %	48,9 %	40,7 %	39,5 %
Ekspor	15,6 %	18,9 %	14,1 %	8,7 %
Lain-lain	39,6 %	32,2 %	45,2 %	51,8 %

d. Pemberian Perkembangan Kredit Bank-bank Pemerintah menurut Daswati I 1968.

Pemberian kredit seluruh Bank-bank Pemerintah (tidak termasuk kredit langsung dari bank Sentral) menurut Daerah Swatrantta Tingkat I pada akhir September (akhir triwulan III, 1968) menunjukkan posisi Rp 33.734,85 juta, sedangkan pada akhir bulan Juni adalah sebesar Rp 30.047,56 juta dan akhir Maret 1968 adalah Rp 20.166,92 juta.

Dari tabel-tabel pemberian kredit pada Daswati I tahun 1968 (*Tabel 11 s.d. 13*) jelas terlihat bahwa pemberian kredit terutama terjadi kepada daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan produksi, seperti ternyata pada tabel di bawah ini :

TRIWULAN						
	I	%	II	%	III	%
Produksi	Rp.10,7 milyar	51,7 %	Rp.16,8	56,0 %	Rp.20,0	59,3 %
Ekspor	Rp. 6,0 milyar	29,7 %	Rp. 7,8	26,0 %	Rp. 8,8	26,1 %
Lain-lain	Rp. 3,4 milyar	16,6 %	Rp. 5,4	18,0 %	Rp. 4,9	14,6 %

Jika dilihat penyebarannya ke daerah-daerah, maka jumlah yang berarti dari kredit bank-bank Pemerintah selama tiga triwulan 1968 terutama ditujukan kepada Daerah-daerah sebagai berikut :

	Trw. I	%	Trw. II	%	Trw. III	%
DKI Jakarta Raya	Rp. 5,9 milyar	29,2	Rp. 8,1 milyar	27,0	Rp. 8,2 milyar	24,3
Daswati I Jabar	Rp. 1,8 milyar	8,9	Rp. 2,5 milyar	8,3	Rp. 2,9 milyar	8,6
Daswati I Jateng	Rp. 2,1 milyar	10,3	Rp. 3,7 milyar	12,3	Rp. 3,9 milyar	11,5
Daswati I Sum.Ut	Rp. 1,9 milyar	9,4	Rp. 2,4 milyar	8,0	Rp. 3,1 milyar	9,2
Daswati I Sum.Sel.	Rp. 0,7 milyar	3,5	Rp. 1,4 milyar	4,6	Rp. 1,7 milyar	5,0
Daswati I Kal. Bar.	Rp. 0,9 milyar	4,5	Rp. 1,4 milyar	4,6	Rp. 1,4 milyar	4,2
Daswati I Jatim	Rp. 3,0 milyar	14,9	Rp. 4,5 milyar	15,0	Rp. 5,1 milyar	15,1

Adapun kredit yang besar yang diberikan di Jakarta (lihat tabel di atas), bukanlah semata-mata digunakan untuk keperluan daerah Jakarta sendiri, tetapi sebagian daripadanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kredit daerah lain yang pemberiannya dilakukan melalui Jakarta, misalnya kredit untuk membiayai ekspor dll. Pemberian kredit untuk daerah Jakarta, terutama disalurkan ke sektor perindustrian, ekspor dan lain-lain.

Pemberian kredit untuk Jawa Timur terutama diarahkan kepada sektor produksi bahan pangan, seperti halnya juga untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, sedangkan untuk daswati I Sumatera Utara pemberian kredit terutama diarahkan kepada produksi bahan ekspor dan ekspor.

Pemberian kredit bank-bank Pemerintah kepada daerah-daerah lainnya menunjukkan perimbangan yang agak merata bagi kegiatan sektor ekonominya.

Tabel 11
Pemberian Kredit Bank-Bank Pemerintah (Excl.Kredit Langsung dari Bank Sentral
Menurut Daswati I, Maret 1968
(jutaan Rp.)

	Daswati I	I. Produksi						II. Ekspor	Perdagangan Dalam Negeri	III. Lain-lain			Jumlah I+II+III	
		Bahan Pangan	Barang Ekspor	Sandang	Perindustrian	Pertambangan	Pra-sarana			Jumlah	Imp. Dg. BE-Kredit	Barang-barang Non Kons.		Barang-barang konsumsi
1	Jakarta	1.412,98	344,70	180,41	984,48	5,80	0,00	2.928,37	360,29	605,92	115,82	644,74	1.727,77	5.861,62
2	Jawa Barat	976,38	111,22	142,34	181,81	0,00	8,45	1.420,20	103,36	3,59	6,33	182,36	295,64	1.797,13
3	Jawa Tengah	1.108,76	126,79	131,78	174,74	0,20	3,35	1.545,62	40,13	11,00	0,00	209,46	260,59	2.108,18
4	Yogyakarta	42,78	0,00	59,29	8,16	0,00	1,10	111,33	6,09	0,00	0,00	10,93	17,02	140,53
5	Jawa Timur	1.669,96	101,27	51,87	119,89	0,24	295,73	2.238,96	75,46	5,95	1,69	141,73	224,83	3.004,47
6	Aceh	34,27	22,95	1,06	1,27	0,08	0,13	59,76	19,21	0,02	0,00	18,58	37,81	231,34
7	Sumatera Utara	118,97	889,79	13,67	133,53	0,00	21,42	1.177,38	32,66	13,73	11,88	57,43	115,70	1.885,70
8	Sumatera Barat	48,70	148,68	12,50	15,07	0,00	4,98	229,93	7,74	0,00	0,00	22,20	29,94	422,39
9	Riau	45,79	45,17	0,00	4,99	0,00	1,59	97,54	27,62	0,00	0,00	17,21	44,83	303,73
10	Jambi	17,61	97,06	0,37	0,11	0,00	4,30	119,45	1,54	0,00	0,00	1,06	2,60	262,58
11	Sumatera Selatan	53,04	82,73	3,55	66,48	0,00	21,80	227,60	19,09	0,00	0,00	41,18	60,27	685,10
12	Lampung	31,74	25,10	0,03	0,03	0,00	1,96	58,86	70,17	0,00	0,00	2,95	73,12	465,75
13	Kalimantan Barat	24,49	61,90	0,00	18,16	0,00	0,40	104,95	15,85	0,00	0,00	91,72	107,57	913,59
14	Kalimantan Tengah	6,46	5,70	0,25	0,00	0,00	0,00	12,41	0,82	0,00	0,00	7,33	8,15	43,09
15	Kalimantan Selatan	14,22	28,53	0,24	4,94	0,56	0,00	48,49	9,51	0,00	0,00	38,24	47,75	278,23
16	Kalimantan Timur	14,93	16,26	0,00	1,44	0,00	0,00	32,63	20,61	0,00	0,00	10,63	31,24	93,23
17	Sulawesi Utara	35,78	12,13	0,99	2,91	0,00	1,40	53,21	13,70	0,00	0,00	21,43	35,13	691,52
18	Sulawesi Tengah	13,35	3,00	0,00	0,65	0,00	0,00	17,00	17,88	0,00	0,00	0,34	18,22	77,32
19	Sulawesi Selatan	56,12	23,89	1,77	19,17	0,02	1,20	102,17	30,53	7,91	0,00	143,63	182,07	490,44
20	Sulawesi Tenggara	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	0,00	2,81	2,86	9,02
21	Maluku	8,00	2,61	0,00	4,58	0,00	0,00	15,19	5,13	0,00	0,00	32,80	37,93	102,40
22	Bali	56,45	2,32	0,45	9,29	0,00	0,49	69,00	6,53	0,00	0,00	14,56	21,09	202,69
23	Nus. Tenggara Barat	26,21	0,00	0,75	0,50	0,00	0,25	27,71	0,00	0,00	0,00	14,36	14,36	67,93
24	Nus. Tenggara Timur	12,15	2,22	0,00	0,28	0,00	0,02	14,67	0,00	0,00	0,00	8,19	8,19	28,94
Jumlah		5.829,20	2.154,02	601,32	1.752,48	6,90	368,57	10.712,49	883,97	648,12	135,72	1.735,87	3.404,68	20.166,92

SUMBER :
BNI Unit I.

Tabel 12
Pemberian Kredit Bank-Bank Pemerintah (Excl. Kredit Langsung dari Bank Sentral
Menurut Daerah Swatantra Tingkat I, Bulan Juni 1968
(jutaan Rp.)

	Daswati I	I. Produksi							II. Ekspor	Perdagangan Dalam Negeri	III. Lain-lain			Jumlah H-II+III		
		Bahan Pangan	Barang Ekspor	Sandang	Perindustrian	Pertambangan	Pra-sarana	Jumlah			Imp. Dg. BE-Kredit	Barang-barang Non Kons.	Barang-barang konsumsi		Lain-lain	Jumlah
1	Jakarta	2.113,26	328,73	243,45	1.563,87	0,00	230,44	4.479,75	1.818,37	374,09	534,51	43,51	921,97	1.874,08	8.192,20	
2	Jawa Barat	1.382,12	57,76	202,70	214,46	0,00	7,12	1.864,16	106,99	132,70	1,63	0,00	345,07	479,40	2.450,55	
3	Jawa Tengah	2.393,22	134,15	124,63	177,26	0,50	3,14	2.832,90	346,57	146,48	0,05	0,00	374,88	521,41	3.700,88	
4	Yogyakarta	84,67	0,00	99,24	8,03	0,00	0,63	192,57	19,68	11,85	0,31	0,00	31,38	43,54	255,79	
5	Jawa Timur	2.744,78	149,38	70,70	195,00	0,25	311,24	3.471,35	588,05	113,78	0,00	0,00	360,32	474,10	4.533,50	
6	Aceh	62,08	31,38	2,85	11,12	0,00	1,09	108,52	150,78	25,82	0,00	0,10	51,29	77,21	336,51	
7	Sumatera Utara	185,53	1.044,84	15,55	188,99	0,00	22,54	1.457,45	740,57	67,83	0,00	0,00	246,70	214,53	2.412,55	
8	Sumatera Barat	97,37	208,93	13,92	33,26	0,00	15,45	368,93	242,63	27,17	0,00	0,00	56,38	83,55	695,11	
9	Riau	54,47	71,25	0,15	9,90	0,00	1,63	137,40	183,17	26,00	0,00	0,00	63,46	89,46	410,03	
10	Jambi	14,28	122,13	0,00	0,10	0,00	3,82	140,33	169,60	13,76	0,00	0,00	30,01	43,77	353,70	
11	Sumatera Selatan	84,39	144,36	2,42	77,54	0,00	252,83	561,54	706,06	31,71	0,00	0,00	85,44	117,15	1.384,75	
12	Lampung	49,35	166,78	0,00	90,03	0,00	92,47	308,63	515,98	6,58	0,00	0,00	9,49	16,07	840,68	
13	Kalimantan Barat	26,45	77,51	0,00	20,43	0,00	0,90	125,29	875,12	29,80	0,00	0,00	339,06	368,86	1.369,27	
14	Kalimantan Tengah	19,67	3,60	0,42	0,42	0,00	0,00	24,11	22,70	6,86	0,00	0,00	10,38	17,24	64,05	
15	Kalimantan Selatan	20,96	39,39	0,55	5,70	0,63	0,00	67,23	214,56	19,00	0,00	0,00	71,92	90,92	372,71	
16	Kalimantan Timur	13,33	20,12	0,00	0,60	0,00	0,00	34,05	26,07	17,42	0,00	0,00	34,22	51,64	111,76	
17	Sulawesi Utara	62,08	38,92	0,00	3,69	0,00	1,74	106,43	561,02	121,93	0,00	0,00	167,33	289,26	956,71	
18	Sulawesi Selatan	84,81	54,35	4,52	38,00	0,11	91,84	273,63	193,54	72,13	0,00	0,00	220,46	292,76	759,76	
19	Sulawesi Tengah	19,67	3,60	0,42	0,00	0,00	0,00	23,69	140,47	55,27	0,00	0,00	56,50	111,77	275,93	
20	Sulawesi Tenggara	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,40	0,00	0,00	0,65	1,05	1,23	
21	Maluku	22,11	5,25	0,00	4,63	0,00	0,00	31,99	21,56	38,72	0,00	0,00	53,93	92,65	146,20	
22	Bali	59,01	2,30	1,28	11,20	0,00	42,65	116,44	51,42	9,65	0,00	0,00	26,38	36,03	203,89	
23	Nus. Tenggara Barat	46,99	1,75	1,86	4,15	0,00	0,25	55,00	57,93	5,53	0,00	0,00	14,36	19,89	132,82	
24	Nus. Tenggara Timur	19,59	7,29	0,00	0,00	0,00	0,22	27,10	47,25	0,00	0,00	0,00	12,63	12,63	86,98	
	Jumlah	9.680,27	2.713,77	784,76	2.658,38	1,49	1.080,00	16.828,67	7.800,09	1.354,48	536,50	43,61	3.484,21	5.418,80	30.047,56	

SUMBER : BNI Unit I.

Tabel 13
Pemberian Kredit Bank-Bank Pemerintah (Excl. Kredit Langsung ari Bank Sentral
Menurut Daerah Swatantra Tingkat I, Bulan September 1968 *)
(jutaan Rp.)

	Daswati I	I. Produksi										II. Ekspor	Perdagangan Dalam Negeri	III. Lain-lain				Jumlah I+II+III
		Bahan Pangan	Barang Ekspor	Sandang	Perindustrian	Pertambangan	Pra-sarana	Jumlah	Imp. Dg. BE-Kredit	Lain-lain	Jumlah			Barang-barang		Jumlah		
														Non Kons.	Barang-barang konsumsi			
1	Jakarta	1.116,32	507,66	367,21	2.884,43	0,00	439,06	5.314,68	1.516,06	664,26	163,93	4,29	557,77	1.390,25	8.220,99			
2	Jawa Barat	1.533,20	69,37	350,33	203,08	0,00	260,11	2.416,09	106,56	318,25	0,00	0,28	113,68	432,21	2.954,86			
3	Jawa Tengah	2.457,93	78,46	258,73	220,85	0,01	14,78	3.030,76	377,64	388,21	0,00	0,00	173,32	511,53	3.919,93			
4	Yogyakarta	95,83	0,00	104,41	12,54	0,00	0,90	213,68	1,24	60,58	0,00	0,00	10,96	71,54	286,46			
5	Jawa Timur	3.184,76	181,25	85,10	246,78	0,06	59,45	3.757,40	629,91	557,29	0,00	0,00	169,63	726,92	5.114,23			
6	Aceh	110,04	41,02	2,26	16,48	0,00	5,22	175,02	132,23	34,07	0,00	0,00	2,32	36,39	343,64			
7	Sumatera Utara	245,68	1.229,41	10,61	266,90	0,00	30,02	1.782,62	1115,71	149,48	0,00	0,00	96,46	245,94	3.144,27			
8	Sumatera Barat	186,89	210,63	18,08	46,55	0,00	26,39	489,14	365,35	27,59	0,00	0,00	12,65	40,24	894,73			
9	Riau	119,65	141,88	0,16	2,08	0,00	3,40	267,17	219,55	61,76	0,00	0,00	13,82	75,58	562,30			
10	Jambi	48,07	200,04	0,00	0,00	0,00	17,59	265,70	106,46	9,19	0,00	0,00	2,83	12,02	384,18			
11	Sumatera Selatan	123,79	299,94	4,55	94,86	0,00	97,12	620,29	959,79	107,38	0,00	0,00	22,40	129,78	1.709,86			
12	Lampung	107,89	172,79	12,19	0,00	0,00	6,88	299,75	461,68	8,72	0,00	0,00	17,68	26,40	787,83			
13	Kalimantan Barat	42,92	91,40	0,00	24,18	0,00	6,00	164,50	806,25	116,50	0,00	0,00	315,81	432,31	1.403,06			
14	Kalimantan Tengah	8,86	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	35,89	5,20	0,00	0,00	2,78	7,98	63,31			
15	Kalimantan Selatan	33,16	57,58	0,95	9,12	0,80	0,00	101,61	273,01	64,90	0,00	0,00	11,56	76,46	451,08			
16	Kalimantan Timur	15,60	32,21	0,00	6,70	0,00	1,05	55,56	37,41	41,61	0,00	0,00	1,30	42,91	135,88			
17	Sulawesi Utara	66,10	43,19	0,00	11,25	0,00	1,77	122,31	828,40	245,51	0,00	0,00	41,56	287,07	1.237,78			
18	Sulawesi Tengah	53,28	5,00	0,37	0,62	0,00	0,00	59,27	224,23	39,78	0,00	0,00	0,60	40,38	323,88			
19	Sulawesi Selatan	147,77	61,84	6,91	309,78	0,11	95,00	621,41	199,60	85,30	0,00	0,00	60,78	146,08	967,09			
20	Sulawesi Tenggara	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	11,70			
21	Maluku	31,52	3,79	0,00	4,52	0,00	0,00	39,83	159,73	54,51	0,00	0,00	13,03	67,54	267,10			
22	Bali	70,71	2,16	4,56	33,92	0,00	57,88	169,23	94,80	45,60	0,00	0,00	0,14	45,74	309,77			
23	Nus. Tenggara Barat	6,47	1,93	0,00	4,62	0,00	0,19	13,21	40,03	51,55	0,00	0,00	6,41	57,96	111,20			
24	Nus. Tenggara Timur	19,99	9,98	0,00	1,13	0,00	1,49	32,59	73,45	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28	130,32			
Jumlah		9.836,26	3.452,11	1.226,42	4.400,42	0,98	1.124,30	20.040,49	8.764,98	3.113,39	163,93	4,57	1.647,49	4.929,38	33.734,85			

*) Angka-angka masih sangat sementara.

SUMBER : BNI Unit I.

e. Perkiraan Perkembangan Kredit 1969-1970.

Sesuai dengan tahun anggaran baru maka perkiraan kredit untuk tahun 1969-1970 dimulai dari permulaan April 1969 sampai dengan permulaan April 1970.

Dalam perhitungan ini diadakan asumsi bahwa selama periode itu tingkat harga-harga rata-rata bulan diperkirakan lebih rendah dari pada tingkat harga rata-rata tahun 1968. Pertambahan jumlah uang yang beredar diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat melancarkan kegiatan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan-tekanan inflasi.

(a) Bank Sentral.

Posisi kredit Bank Sentral sampai akhir September 1968, di luar pengadaan beras, berjumlah Rp 41,5 milyar. Pada akhir triwulan IV 1968 posisi ini akan bertambah sebesar Rp 16,6 milyar yaitu :

- Impor kapas PL 480 (Counterparts)	: + Rp. 2,3 milyar
- Impor benang tenun PL (Couterparts)	: + Rp. 5,7 milyar
- BE Kredit 1968	: + Rp. 2,5 milyar
- Pertanian	: + Rp. 2,1 milyar
- Ekspor	: + Rp. 1,3 milyar
- Tekstil	: + Rp. 2,3 milyar
- Gula (produksi + impor)	: <u>+ Rp. 2,6 milyar</u>
	+ Rp.18,8 milyar
Pelunasan kredit =	<u>- Rp. 2,2 milyar</u>
Jumlah	+Rp.16,6 milyar

Dengan demikian posisi kredit Bank Sentral pada akhir Desember 1968, di luar pengadaan beras berjumlah Rp. 58,1 milyar.

Posisi kredit untuk pengadaan beras pada akhir bulan Desember 1968 diperkirakan berjumlah Rp. 32,1 milyar.

Dalam triwulan I tahun 1969 diperkirakan kredit Bank Sentral bertambah sebesar Rp. 5,0 milyar yaitu untuk :

- Pertanian	: + Rp. 2,5 milyar
- Produksi/industri	: + Rp. 2,0 milyar
- Ekspor	: <u>+ Rp. 0,5 milyar</u>
Jumlah	: + Rp. 5,0 milyar.

Dengan demikian posisi kredit Bank Sentral di luar kredit untuk pengadaan beras pada akhir bulan Maret 1969 akan menjadi Rp. 58,1 milyar + Rp. 5,0 milyar = Rp. 63,1 milyar.

Jika diperhitungkan kredit untuk pengadaan beras yang diperkirakan pada akhir triwulan I – 1969 berjumlah Rp. 29,7 milyar, maka posisi kredit Bank Sentral pada akhir bulan Maret 1969 akan mencapai Rp. 90,2 milyar.

Sampai akhir bulan Maret 1970 posisi kredit Bank Sentral, tidak termasuk kredit untuk pengadaan beras, diperkirakan menjadi sebesar Rp. 137, 7 milyar.

(b) Bank-bank Umum Pemerintah.

Posisi kredit bank-bank umum Pemerintah pada akhir bulan September 1968 berjumlah Rp. 21,0 milyar. Dalam Triwulan IV 1968 posisi ini akan diperkirakan bertambah Rp. 0,7 milyar setiap bulan sehingga sampai akhir bulan Desember 1968 mencapai posisi sebesar Rp. 23,1 milyar.

Sejak awal tahun 1969 sampai dengan akhir triwulan I-1970 kredit bank-bank Umum Pemerintah akan diperkirakan bertambah sebesar ± Rp. 34,2 milyar.

(c) Bank-bank Umum Swasta.

Posisi kredit bank-bank Umum Swasta pada akhir bulan September 1968 berjumlah Rp. 8,4 milyar. Pada akhir triwulan IV-1968 posisi ini akan diperkirakan bertambah 5 % sebulan sehingga mencapai posisi Rp. 9,7 milyar. Sejak awal tahun 1969 sampai dengan akhir triwulan I-1970 posisi kredit bank-bank Umum Swasta diperkirakan akan bertambah sebesar Rp. 9,9 milyar sehingga mencapai posisi Rp. 19,6 milyar.

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi kredit perbankan seluruhnya pada akhir triwulan I 1970 akan mencapai :

a. Bank Sentral	: Rp. 137,7 milyar	xx)
b. Bank-bank Umum Pemerintah	: Rp. 57,3 milyar	
c. <u>Bank-bank Umum Swasta</u>	: <u>Rp. 19,6 milyar</u>	
<u>Jumlah</u>	: <u>Rp. 214,6 milyar</u>	xx)

xx) Dalam angka tersebut pemberian kredit untuk pengadaan beras mulai akhir triwulan I-1969 sampai dengan akhir triwulan I 1970 belum diperhitungkan.

Dengan demikian selama tahun anggaran 1969-1970, kredit perbankan seluruhnya akan bertambah sebesar Rp. 84,0 milyar.

Berhubung tahun 1969-1970 merupakan tahun pertama dari Repelita maka pengarahannya pemberian kredit akan disesuaikan dengan prioritas-prioritas yang ditentukan dalam Repelita tersebut.

VI. PERKEMBANGAN LALU LINTAS DEvisa

Perkembangan lalu lintas Devisa dapat dijelaskan dengan memberikan gambaran dari perkembangan neraca pembayaran dalam keseluruhannya untuk tahun 1968 dan prognosa 1969.

Perkembangan Neraca Pembayaran.

Gambaran neraca pembayaran Indonesia untuk tahun 1968 dan program 1969 adalah seperti berikut :

Tabel 14
Neraca Pembayaran Indonesia 1968 - 1969
(dalam jutaan Rp.)

	Taksiran 1968 (diperbaiki)	Prognosa 1969
I. Barang dan jasa		
1. Ekspor (FOB)	847	953
Minyak	(287)	(358)
Tanpa Minyak	(560)	(595)
2. Impor (FOB)	-914	-956
Minyak	(-76)	(-82)
Tanpa Minyak	(-838)	(-874)
Neraca Perdagangan	-67	-3
3. Jasa-jasa	-314	-361
Transaksi Berjalan	-381	-364
II. Lalu lintas Modal dan Transfer		
1. Sektor swasta (netto)	58	20
2. Sektor pemerintah	344	424
Jumlah	402	444
3. Angsuran Hutang-hutang pemasukan Modal (netto)	-72	-80
III. Lalu Lintas Moneter	49	0
(+=defisit)	0	0
(-=surplus)		
IV. Selisih yang tidak diperhitungkan	2	0

Sumber : Bank Negara Unit I

Sebagaimana tampak pada tabel di atas, maka neraca pembayaran 1969 diperkirakan dapat seimbang. Dibandingkan dengan keadaan dalam tahun 1968 (yang mengalami defisit sebesar US\$ 49 juta), maka hal ini merupakan suatu kemajuan. Neraca perdagangan 1969 diperkirakan mengalami defisit sebesar US\$ 3 juta. Dibandingkan dengan defisit pada tahun 1968 (yang berjumlah US\$ 67 juta), maka tahun 1969 merupakan suatu langkah maju. Transaksi berjalan pada tahun 1969 diperkirakan mengalami defisit sebesar US\$ 364 juta. Hal ini disebabkan karena ada defisit pada neraca jasa-jasa sebesar US\$ 361 juta.

Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 1968, keadaan transaksi berjalan pada tahun 1969 menunjukkan gambaran yang lebih baik dari pada tahun 1968. Defisit pada transaksi berjalan tersebut diperkirakan dapat diimbangi dengan pemasukan modal pada sektor pemerintah maupun pada sektor swasta, yang diperkirakan berjumlah US\$.444 juta. Jumlah ini harus dikurangi dengan pembayaran angsuran hutang-hutang sebesar US\$.80 juta sehingga yang tersedia pada lalulintas modal dan transfer berjumlah US\$ 364 juta.

Penjelasan Pos per Pos

I. Transaksi Berjalan

1. Ekspor (termasuk minyak-netto, *overprice*)

Ekspor tanpa minyak diperkirakan untuk tahun 1969 sebesar US \$ 595 juta, yang menunjukkan kenaikan sebesar 6,2% kalau dibandingkan dengan tahun 1968. Ekspor minyak diperkirakan mencapai US \$.358 juta pada tahun 1969, yang merupakan kenaikan sebesar 24% di atas tahun 1968. Ekspor keseluruhannya pada tahun 1969 diperkirakan akan naik dari US \$.847 juta dalam tahun 1968 menjadi US \$. 953 juta, sehingga menunjukkan kenaikan sebesar 12,5%.

2. Impor

Impor tanpa minyak diperkirakan mencapai US \$.874 juta dalam tahun 1969. Jika ditambah dengan impor minyak maka jumlah ini menjadi US \$.956 juta, yang merupakan kenaikan sebesar 4,5% di atas impor tahun 1968.

II. Lalu lintas Modal dan Transfer (termasuk bantuan-bantuan)

Untuk tahun 1969 diperkirakan pemasukan modal sebesar US \$.444 juta, yang terdiri atas :

a. bantuan luar negeri (program aid)	US \$. 320 juta
b. bantuan luar negeri (project aid)	<u>US \$. 104 juta</u>
sektor pemerintah (a+b)	US \$. 424 juta
c. Sektor swasta	<u>US \$. 20 juta</u>
	US \$. 444 juta

Kalau dibandingkan dengan tahun 1968, yang berjumlah US \$.402 juta, maka keadaan pada tahun 1969 diperkirakan ada kenaikan sebesar 10,4 %. Jumlah-jumlah tersebut di atas harus dikurangi dengan angsuran hutang keluar negeri.

Dengan demikian, pemasukan modal netto dalam tahun 1969 diperkirakan US \$.444 juta dikurangi dengan US \$.80 juta, menjadi US \$.364 juta. Dalam tahun 1968 jumlah US \$.402 juta tersebut di atas harus dikurangi dengan US \$.72 juta, sehingga jumlahnya menjadi US \$. 330 juta.

**RENCANA PENERIMAAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1969/1970
(milyar Rp)**

JENIS PENERIMAAN	JUMLAH PENERIMAAN
I. Penerimaan Rutin	228.000
A. Pajak Langsung	91.200
1. Pajak Pendapatan	15.500
1.1. Buruh	6.500
1.1.1. Dalam Rupiah	4.400
1.1.2. Dalam Valuta Asing	2.100
1.2. Usahawan	9.000
1.2.1. Kohir	3.000
1.2.2. MPS	6.000
2. Pajak Perseroan	15.000
2.1. Perusahaan Negara	6.000
2.1.1. Kohir	1.500
2.1.2. MPS	4.500
2.2. Perusahaan Swasta	9.000
2.2.1. Kohir	2.000
2.2.2. MPS	7.000
3. Pajak Perseroan Minyak	48.700
4. MPO	11.500
4.1. Ditjen Pajak	10.500
4.2. Ditjen Bea dan Cukai	1.000
5. Lain-lain	500
B. Pajak Tidak Langsung	134.300
1. Pajak Penjualan	12.000
2. Pajak Penjualan Impor	10.000
3. Cukai	28.200
3.1. Cukai Tembakau	25.500
3.2. Cukai Gula	2.400
3.3. Cukai Bir	180
3.4. Cukai Alkohol Sulingan	120
3.5. Cukai Minyak Tanah	p.m
4. Bea Masuk	60.000
5. Pajak Devisa Ekspor	7.000
6. Penerimaan Minyak Lainnya	14.100
7. Lain-lain	3.000
C. Penerimaan Non-Tax	2.500
II. Penerimaan Pembangunan	99.418
1. Kredit Luar Negeri	63.184
2. Bantuan Proyek	36.234
JUMLAH	327.418

**DASAR PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 1969 - 1970 (RAPBN 1969-1970)
(dalam milyar Rp.)**

I. Penerimaan Rutin :		228.000
Terdiri dari :		
A. Pajak Langsung		91.200
B. Pajak Tidak Langsung		134.300
C. Penerimaan Non-tax		2.500
A. Pajak Langsung :		91.200
1. Pajak pendapatan :		15.500
1.1. Pajak Pendapatan Buruh :	6.500	
1.1.1. Dalam Rupiah :	4.400	
Asumsi-asumsi :		
(1) Bebas minimum kena pajak dinaikkan menjadi Rp.5.000,- sebulan dengan satu isteri dan 3 anak, dan tarip pajak pendapatan diturunkan sebesar rata-rata 45 % dari Pajak yang dibayar atas gaji bulanan sampai Rp.100.000,- dalam triwulan IV-1968, sehingga jumlah wajib pajak berkurang; tetapi turunnya penerimaan sebagian diimbangi oleh :		
(2) Adanya kemungkinan kenaikan upah.		
(3) Bertambahnya kesempatan kerja.		
Dengan asumsi-asumsi tersebut diperkirakan bahwa untuk tahun anggaran 1969/1970 akan diterima :		
Realisasi penerimaan s/d Triwulan IV-1968 : 2.857		
Prognosa penerimaan Triwulan IV-1968 : 1.200		
Jumlah penerimaan 1968 : 4.057..		
Penerimaan 1969-1970 menjadi : $4 \times 75 \% \times \text{Rp.1.200,-}$ juta (penerimaan triwulan IV-1968) =Rp.3.600,- juta ditambah dengan hasil-hasil verifikasi yang diintensifkan sebesar $20 \% \times \text{Rp.3.600,-}$ juta = Rp.720,- juta, maka jumlah seluruhnya Rp.4.320,- juta atau dibulatkan : Rp.4.400,- milyar.		
1.1.2. Dalam Valuta Asing	2.100	
Dalam tahun 1968 diperkirakan dapat dikonversikan sejumlah US\$.4.200.000,- untuk tahun pajak 1966 dan penerimaan dalam tahun 1967 yang baru dikonversikan dalam tahun 1968 sebesar US\$.1.800.000,- (tak akan banyak terjadi lagi dalam 1969/1970) dengan kurs BE sebesar Rp.300,-/US\$. Berhubung dengan asumsi-asumsi tersebut di dalam 1.1.1. di atas dimana penurunan penerimaan karena ryurunnya tarip tidak banyak terhadap pendapatan-pendapatan tinggi di atas Rp.1,2 juta, ditambah dengan penertiban pembayaran pajak buruh-buruh asing yang menerima upah dalam valuta asing maka untuk 1969-1970 diperkirakan masih dapat dikonversikan US\$.6.000.000,- dengan kurs Rp.350,-/US\$. atau rupiahnya : Rp.2.100 juta, atau Rp.2.100 milyard.		

1.2. Pajak Pendapatan Usahawan.	9.000
1.2.1. Menurut cara lama (kohir)	3.000
Unsur-unsurnya :	
(a) Pencairan tunggakan.	
(b) Verifikasi MPS-1968 dengan penagihan cara lama (kohir).	
ad. (a).	
Jumlah tunggakan per 1 Oktober 1968...Rp.4.600 juta	
Ditetapkan rampung dengan pengurangan karena ketinggian	Rp.4.000 juta
Rencana penerimaan Triwulan IV-1968 dan Trwiwulan I-1969	Rp. 1.500 juta
Sisa 1 April 1969.....	Rp. 2.500 juta
Dapat ditagih 70 % atau	Rp. 1.750 juta
atau dibulatkan	Rp. 1.800 milyar
ad. (b) Asumsi :	
Penyetoran MPS dan MPO selama 1968 baru berjumlah maksimum separo daripada yang seharusnya.	
Realisasi MPS Pajak Pendapatan s.d. Triwulan III-1968	Rp. 944 juta
Rencana penerimaan Triwulan IV-1968..	Rp. 800 juta
Jumlah	Rp.1.794 juta
Rencana penerimaan Pajak Pendapatan dari MPO 30% x Rp.5.391 juta	Rp.1.617 juta
Jumlah pajak yang sudah dibayar selama 1968 untuk tahun pajak 1968	Rp. 3.411 juta
Perkiraan hasil verifikasi, sesudah penyetoran tambahan sendiri (1.2.2. ad.a) : 35 %	Rp. 1.193 juta
atau dibulatkan	Rp.1.200 milyar.
1.2.2. Menurut cara baru (MPS)	6.000
Unsur-unsurnya :	
(a) Penyetoran tambahan MPS-1968	
(b) MPS bulanan tahun 1969-1970	
ad. (a). Asumsi :	
Penyetoran MPS dan MPO selama 1968 baru berjumlah maksimum separo dari pada yang seharusnya. Jumlah pajak yang sudah dibayar selama 1968 untuk tahun pajak 1968	Rp.3.411 juta
Penyetoran tambahan MPS-1968 oleh wajib pajak sendiri ddiperkirakan : 45 % x Rp.3.411 juta=	Rp.1.489 juta
atau dibulatkan	Rp.1.500 milyar.
ad. (b) Asumsi-asumsi :	
Selain peninggian pendapatan minimum kena pajak dan turunnya tarip pajak pendapatan seperti diuraikan dalam 1.1.1.	
(1) Perluasan jumlah wajib pajak;	
(2) Peningkatan intensitas pengawasan dan verifikasi ;	

(3) Adanya peningkatan kegiatan produksi dan kegiatan kegiatan ekonomi lainnya;
 (4) Peningkatan presentase taripMPS secara berangsur-angsur
 Rencana realisasi MPS bulanan 1968Rp.1.794 juta
 Penyetoran tambahan ad aRp.1.500 juta
 Verifikasi 1.2.1. ad bRp.1.200 juta
 Jumlah Pajak Pendapatan tahun pajak 1968 yang sebenarnya terhutangRp.4.494 juta
 Memperhatikan asumsi tersebut di atas, maka diperkirakan rencana MPS bulanan 1969-1970 berjumlah sama dengan rencana realisasi ajak Pendapatan seperti Pajak Pendapatan seperti dihitung di atas sebesar Rp.4.494 juta atau dibulatkan **Rp. 4.500 milyar.**

2. Pajak Perseroan.	15.000
2.1. Perseroan negara :	6.000
2.1.1. Menurut cara lama (kohir)	1.500
Unsur-unsurnya :	
(a) Pencairan tunggakan.	
(b) Verifikaasi MPS-1968	
ad. (a).	
Jumlah tunggakan per 1-10-1968	: Rp. 1.376 juta
Perkiraan penetapan tambahan (rampung) tahun 1966 dan 1967	: <u>Rp. 1.000 juta</u>
Jumlah	: Rp. 2.376 juta
Rencana penerimaan triwulan IV-1968 dan triwulan I-1969	: <u>Rp. 850 juta</u>
Sisa pada 1 April 1969	: Rp. 1.526 juta
Kapasitas penagihan 75 %	: Rp. 1.144 juta
Atau dibulatkan	: Rp. 1.100 milyar
ad. (b). Asumsi :	
Penyetoran MPS dan MPO selama 1968 baru berjumlah maksimum 60 % dari pada yang seharusnya.	
Realisasi MPS s.d. triwulan III-1968	Rp.1.960 juta
Rencana penerimaan triwulan IV-1968...	Rp.1.340 juta
Jumlah	Rp.3.300 juta
Rencana penerimaan Pajak Perseroan PN-PN dari MPO sebesar 11 % x Rp.5.391 juta	Rp. 593 juta
Jumlah Pajak Perseroan yang sudah dibayar selama 1968 untuk tahun pajak 1968	Rp.3.893 juta
Diperkirakan hasil verifikasi, sesudah penyetoran tambahan sendiri (2.1.2. ad.a) 10 % Rp. 389 juta, dibulatkan	
Rp. 0,400 milyar.	
2.1.2. Menurut cara baru (MPS)	4.500
Unsur-unsurnya :	
(a) Penyetoran tambahan MPS 1968	
(b) MPS bulanan tahun 1969-1970	
ad. (a). Asumsi :	

Penyetoran MPS dan MPO selama 1968 baru berjumlah maksimum 60 % dari pada yang seharusnya.

Jumlah Pajak Perseroan yang sudah dibayar selama 1968 untuk tahun pajak 1968 : Rp.3.893 juta.

Penyetoran tambahan MPS 1968 oleh wajib pajak sendiri diperkirakan $10\% \times \text{Rp.3.893 juta} = \text{Rp.389 juta}$ dibulatkan menjadi**Rp. 0,400 milyar**

ad. (b). Asumsi-asumsi :

(1) Penurunan tarif efektif pajak perseroan rata-rata sebesar 35 % tambahan laba kena pajak antara Rp.250.000 dan Rp.7,5 juta setahun sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan, tetapi yang diimbangi dengan :

(2) Peningkatan disiplin membayar pajak,

(3) Penertiban PN-PN yang berakibat :

(4) Peningkatan produksi dan hasil usaha.

Rencana realisasi MPS bulanan tahun 1968....Rp.3.300 juta

Penyetoran tambahan (ad.a)Rp. 400 juta

Verifikasi 2.1.1. ad.bRp. 400 juta

Jumlah Pajak Perseroan PN-PN tahun Pajak 1968 yang sebenarnya terhutangRp.4.100 juta

Memperhatikan asumsi-asumsi tersebut di atas, yang saling mengimbangi, maka diperkirakan rencana MPS bulanan 1969-1970 berjumlah sama dengan rencana realisasi Pajak Perseroan 1968, seperti dihitung di atas, sebesar Rp.4.100 juta atau **Rp.4,100 milyar.**

2.2. Perusahaan Swasta :

9.000

2.2.1. Menurut cara lama (kohir)

2.000

Unsur-unsurnya :

(a) Pencairan tunggakan.

(b) Verifikasi MPS-1968.

ad. (a).

Jumlah tunggakan per 1 Oktober 1968 .. Rp.1.000 juta
perkiraan penetapan tambahan (rampung) tahun 1967 dan 1966 Rp. 1.650 juta

Jumlah Rp. 2.650 juta

Rencana penerimaan Triwulan IV-1968.. Rp. 1.600 juta

Sisa pada 1 April 1969 Rp. 1.050 juta

Kapasitas penagihan 80 % Rp. 787 juta

atau **Rp. 0,800 milyar**

ad. (b). Asumsi :

Penyetoran MPS dan MPO selama 1968 baru berjumlah maksimum 50 % dari pada yang seharusnya.

Triwulan III-1968 Rp.1.500 juta

Rencana penerimaan triwulan IV-1968... Rp.1.300 juta

Jumlah Rp.2.800 juta

Rencana penerimaan MPO : $59\% \times \text{Rp.5.391 juta} =$

..... Rp.3.181 juta

Jumlah Pajak Perseroan Swasta yang sudah dibayar selama 1968 untuk tahun pajak 1968 Rp.5.981 juta
dibulatkan Rp.6,000 milyar
Diperkirakan hasil verifikasi, sesudah penyetoran tambahan sendiri (2.2.2. Ad a). 20% Rp. 1.200 juta
atau **Rp.1,200 milyar.**

2.2.2. Menurut cara baru (MPS)

Unsur-unsurnya :

- (a) Penyetoran tambahan MPS-1968.
- (b) MPS bulanan tahun 1969-1970.

ad. (a). Asumsi :

Penyetoran MPS dan MPO selama 1968 baru berjumlah maksimum 50% dari pada yang seharusnya. Jumlah Pajak Perseroan Swasta yang sudah dibayar selama 1968 untuk tahun pajak 1968 :Rp. 3,000 milyar
Penyetoran tambahan MPS-1968 diperkirakan 25% x Rp. 3,000 milyar = **Rp.1,500 milyar.**

ad. (b). Asumsi-asumsi :

- (1) Penurunan tarif seperti dikemukakan dalam 2.1.1.
- (2) Peningkatan tarif MPS secara berangsur-angsur.
- (3) Perluasan jumlah wajib pajak.
- (4) Peningkatan intensitas pengawasan dan verifikasi.
- (5) Peningkatan kapasitas Produksi dan kegiatan ekonomi lainnya.

Rencana realisasi MPS bulanan 1968..... Rp. 2.800 juta
Penyetoran tambahan ad. A Rp. 1.500 juta
Verifikasi 2.2.1. Ad.b..... Rp. 1.200 juta
Jumlah Rp. 5.500 juta
Memperhatikan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka diperkirakan rencana MPS bulanan 1969-1970 berjumlah sama dengan rencana realisasi pajak perseroan 1968 seperti dihitung di atas sebesar Rp. 5.500 juta atau dibulatkan **Rp. 5,500 milyar.**

3. Pajak Perseroan Minyak

48.700

Asumsi-asumsi :

- (1) Penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan Minyak Asing diperkirakan untuk tahun 1969-1970 berjumlah US\$.150 juta.
 - (2) Kurs BE : Rp.350/US\$.
 - (3) Kurs NIM (Nilai lawan Minyak) Rp.300/US\$.
- Perkiraan Penerimaan : US\$. 150 juta
Untuk Pembekalan Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri :
US\$.75 juta ; dalam Rupiah : 75,0 juta x 300 = Rp.22,500 milyar. Untuk dikonversikan = US\$.75,0 juta dalam rupiah = 75,0 juta x 350 = Rp.26,250 milyar.
Jumlah seluruhnya Rp.**48,700** milyar (dibulatkan).

4. MPO (Memungut Pajak Orang).	11.500
4.1. Dipungut Direktorat Jenderal Pajak	10.500
Asumsi-asumsi :	
(1) Tarif MPO berangsur-angsur dinaikkan.	
(2) Perluasan pemungutan.	
(3) Peningkatan pengawasan.	
Perkiraan penerimaan :	
Realisasi s.d. triwulan III-1968Rp. 3.475 juta	
Rencana penerimaan triwulan IV-1968,Rp.1.916 juta	
Rencana penerimaan 1968Rp.5.391 juta	
Memperhatikan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka diperkirakan penerimaan MPO untuk tahun 1969-1970 sebesar 2 x Rp.5.391 juta = Rp.10.782 juta atau dibulatkan :	
Rp.10,500 milyar.	
4.2. Dipungut Direktorat Jenderal Bea-Cukai	1.000
Asumsi-asumsi :	
(1) Tarif MPO untuk impor sebagai barang kiriman 5%	
(2) Devisa Impor barang kiriman diperkirakan : US\$. 85 juta, darimana terkena MPO hanya 40% atau US\$.34 juta.	
(3) Tarif efektif untuk impor sebagai barang kiriman : Rp.640/US\$.	
Perkiraan penerimaan : 5% x 34 juta x Rp.640 = Rp. 1.088 juta atau dibulatkan Rp. 1.000 milyar	
5. Lain-lain :	500
Unsur-unsurnya :	
(1) Pajak kekayaan	
(2) Pajak Dividen	
(3) Penerimaan lain-lain.	
Perkiraan penerimaan :	
Realisasi s.d. triwulan III-1968Rp. 180 juta	
Rencana penerimaan triwulan IV-1968.....Rp. 100 juta	
Jumlah penerimaan 1968= Rp. 280 juta	
Untuk tahun 1969-1970, mengingat realisasi tahun 1968 dan intensifikasi, maka diperkirakan penerimaan untuk realisasi 1968 atau 2 x Rp.280 juta = Rp.560 juta, atau dibulatkan : Rp.0,500 milyar.	
B. Pajak Tidak Langsung.	134.300
1. Pajak Penjualan.	12.000
Asumsi-asumsi :	
(1) Kenaikan produksi fisik : 5 - 10%	
(2) Tingkat volume impor minimal sama seperti di dalam tahun 1968.	
(3) Penurunan tarif secara selektif akan mengakibatkan penurunan pajak 5%.	
(4) Tingkat intensifikasi minimal : 10%.	
Penerimaan penerimaan :	

<p>Rencana penerimaan pajak penjualan triwulan IV-1968 sebesar Rp. 2.700 juta.</p> <p>Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka diperkirakan untuk tahun 1969-1970 akan diterima :</p> $\frac{105}{100} \times \frac{110}{100} \times \frac{95}{100} \times 4 \times \text{Rp. } 2.700 \text{ juta} = \text{Rp. } 11,850 \text{ juta atau dibulatkan menjadi } \mathbf{\text{Rp. } 12,000 \text{ milyar.}}$		10.000										
<p>2. Pajak Penjualan Impor.</p> <p>Penerimaan ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.</p> <p>Asumsi-asumsi :</p> <p>(1) Bea masuk diperkirakan untuk tahun 1969-1970 sebesar . Rp.60.000 milyar</p> <p>(2) Pajak penjualan Impor diperkirakan 16,5% dari Bea Masuk tahun 1969-1970</p> <p>Perkiraan penerimaan : $16,5\% \times \text{Rp.}60.000 \text{ milyar}$ atau dibulatkan Rp.10,000 milyar.</p>		28.200										
<p>3. Cukai</p>		28.200										
<p>3.1. Cukai Tembakau</p> <p>Asumsi-asumsi :</p> <p>(1) Walaupun panen tembakau tahun 1968 gagal, tetapi produksi mutu terus menerus.</p> <p>(2) Diadakan perbaikan mutu terus menerus</p> <p>(3) Harga banderol terus diusahakan agar disesuaikan dengan harga penjualan di pasaran bebas.</p> <p>Perkiraan penerimaan :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Triwulan II-1969</td> <td style="width: 40%;">: Rp. 6,000 milyar</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III-1969</td> <td>: Rp. 6,600 milyar</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV-1969</td> <td>: Rp. 6,600 milyar</td> </tr> <tr> <td>Triwulan I-1970</td> <td><u>: Rp. 6,300 milyar</u></td> </tr> <tr> <td>Tahun anggaran 1969-1970</td> <td>: Rp. 25,500 milyar</td> </tr> </table>		Triwulan II-1969	: Rp. 6,000 milyar	Triwulan III-1969	: Rp. 6,600 milyar	Triwulan IV-1969	: Rp. 6,600 milyar	Triwulan I-1970	<u>: Rp. 6,300 milyar</u>	Tahun anggaran 1969-1970	: Rp. 25,500 milyar	25.500
Triwulan II-1969	: Rp. 6,000 milyar											
Triwulan III-1969	: Rp. 6,600 milyar											
Triwulan IV-1969	: Rp. 6,600 milyar											
Triwulan I-1970	<u>: Rp. 6,300 milyar</u>											
Tahun anggaran 1969-1970	: Rp. 25,500 milyar											
<p>3.2. Cukai Gula</p> <p>Asumsi-asumsi :</p> <p>(1) Produksi dan impor gula untuk tahun anggaran 1969-1970 diperkirakan sebesar 600.000 ton.</p> <p>(2) Harga rata-rata dasar pengenaan cukai adalah Rp.40,-/kg.</p> <p>(3) Tarip cukai : 10%</p> <p>Perkiraan penerimaan : $10\% \times 600.000 \times \text{Rp.}40,- = \mathbf{\text{Rp.}2.400 \text{ , milyar.}}$</p>		2.400										
<p>3.3. Cukai Bier</p> <p>Asumsi : rata-rata penerimaan per bulan adalah Rp.15 juta</p> <p>Berarti di dalam satu tahun diperkirakan diterima sebesar : $12 \times \text{Rp.}15 \text{ juta} = \text{Rp.}180 \text{ juta atau } \mathbf{\text{Rp.}0,180 \text{ milyar.}}$</p>		180										
<p>3.4. Cukai Alkohol Sulingan.</p> <p>Asumsi : Rata-rata penerimaan perbulan adalah Rp.10 juta</p> <p>Berarti di dalam satu tahun diperkirakan diterima sebesar : $12 \times \text{Rp.}10 \text{ juta} = \text{Rp.}120 \text{ juta atau } \mathbf{\text{Rp.}0,120 \text{ milyar.}}$</p>		120										
<p>3.5. Cukai Minyak Tanah</p> <p>(Lihat pos penerimaan lain-lain Penerimaan Minyak)</p>		p.m.										

4. Bea Masuk

60.000

Asumsi-asumsi yang yang dipakai untuk perhitungan Bea Masuk adalah dasar angka Impor Neraca Pembayaran tahun takwim 1969 dan tarip pungutan bea masuk atas golongan-golongan barang dalam tahun 1968.

Angka-angka Neraca Pembayaran adalah sebagai berikut (angka-angka dalam c & f) :

BE	445
Bantuan Luar Negeri (termasuk PL-480)	320
Proyek-proyek	104
Modal Asing	15
DP dan devisa bebas	<u>85</u>
	969

Angka-angka impor ini dibagi menurut (I) Impor yang bebas Bea Masuk dan (II) yang dikenakan Bea Masuk yakni :

Jumlah (I + II) = \$ 484 + \$ 485 = **965**

	Impor dalam jutaan US\$
I. Impor yang bebas Bea Masuk	484
a. Impor BE	365
Diperinci menurut	
Golongan A	(310)
Golongan B yang terdiri atas :	(55)
Impor dengan tarip (0%)	20
Impor khusus	35
b. Impor	

Ada Bagian Yang Hilang

5. Pajak Devisa Ekspor.

7.000

Asumsi-asumsi :

- (1) Ekspor rata-rata per bulan di luar Minyak diperkirakan sebesar :
US\$.40 juta; berarti ekspor satu tahun : 12 x US\$.40 juta =
US\$.480 juta.
 - (2) bagian Pemerintah Pusat : 5% dari devisa Golongan A
 - (3) Ekspor Golongan A adalah \$400 juta
 - (4) Kurs BE : Rp.350/US\$.
- Perkiraan penerimaan : 5% x 400 juta x Rp.350 = **Rp.7.000 milyar.**

6. Lain-lain Penerimaan Minyak

14.100

Asumsi-asumsi :

- (1) Volume penjualan tahun anggaran 1969-1970 diperkirakan sama dengan volume penjualan tahun 1968.
- (2) Harga penjualan untuk tahun anggaran 1969-1970 diperkirakan sama dengan harga penjualan tahun 1968.
- (3) Biaya dalam rupiah untuk tahun anggaran 1969-1970 diperkirakan naik 50% dibandingkan tahun 1968.
- (4) Penggunaan minyak oleh ABRI diperkirakan sebesar Rp.8,000 milyar.

Perkiraan penerimaan :
 Hasil penjualan : Rp. 51,500 milyar
 Biaya : Rp. 37,400 milyar
 Laba bersih : Rp. 14,100 milyar.
 Dari Laba Bersih Minyak ini akan diperhitungkan penerimaan untuk Pajak Penjualan Minyak dan Cukai Minyak Tanah.

7. Lain-lain. 3.000

Unsur-unsurnya :
 (1) Bea Meterai
 (2) Bea Balik nama
 Harga Tetap.
 (3) Bea Lelang
 (4) Penerimaan lain-lain.
 Perkiraan penerimaan :
 Realisasi s.d. triwulan III-1968 tanpa Bea Balik Nama Kendaraan.
 BermotorRp.1.718 juta
 Rencana penerimaan triwulan IV-1968.....Rp. 700 juta
 JumlahRp.2.418 juta
 Untuk tahun 1969-1970 diperkirakan karena intensifikasi penerimaan sebesar **Rp. 3,000 milyar.**

II. Penerimaan Pembangunan. 99.418

1. Bantuan Kredit BE dan PL-480 63.184

Asumsi-asumsi :
 (1) Kredit BE yang tersedia adalah \$ 125 juta terdiri atas :
 a. Barang-barang dalam daftar BE \$ 35 juta semua direalisasikan.
 b. Pupuk \$ 75 juta sermuanya direalisasikan tetapi berhubung dijual atas dasar kredit 9 bln maka hanya \$ 19 juta yang diterima.
 c. Tepung terigu \$ 15 juta direalisasikan atas dasar kredit 8 bulan sehingga yang diterima diperkirakan hanya \$ 5 juta.
 Sehingga yang diterima hanya (\$ 35 + \$ 19 + \$ 5) juta = \$ 59 juta atau (59 x Rp.350) juta = **Rp.20,650 milyar.**
 (2) PL-480 dan Kennedy Round yang tersedia adalah :
 a. Bahan sandang terdiri atas kapas dan benang tenun \$ 60 juta dapat direalisasikan seluruhnya, tetapi penerimaan yang diharapkan hanya \$ 24,52 juta.
 b. Pangan terdiri atas beras \$ 70 juta, tepung terigu \$ 50 juta dan Kennedy Round \$ 15 juta dapat direalisasikan seluruhnya, tetapi penerimaan yang diharapkan hanya \$ 97 juta.
 Sehingga penerimaan seluruhnya (\$ 24,52 + \$ 97) juta = \$ 121,52 juta atau (121,52 x Rp.350) juta = **Rp.42,534 milyar.**
 Perkiraan penerimaan keseluruhan adalah Rp.20,650 milyar + Rp.42,534 milyar = **Rp.63,184 milyar.**

2. Nilai lawan Bantuan Proyek. 36.234

Terdiri atas realisasi dari bantuan proyek dan bantuan teknis tahun 1968 yang direalisasikan dalam tahun 1969, dan bantuan tahun 1969, yang keseluruhannya berjumlah \$ 103,525 juta atau (103,525 x Rp.350) juta sama dengan **Rp 36,234 milyar.**

Lampiran IIa.

ANGKA-ANGKA RAPBN 1969/1970
(termasuk bantuan proyek/bantuan teknis)

dalam ribuan rupiah

DEPARTEMEN/LEMBAGA	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN RUTIN	ANGGARAN PEMBANGUNAN		
			JUMLAH	RUPIAH	BANTUAN PROYEK / BANTUAN TEKNIS
MPRS	180.607,6	170.607,6	10.000,0	10.000,0	0,0
DPRGR	1.090.150,0	381.150,0	709.000,0	709.000,0	0,0
DPA	41.266,4	36.266,4	5.000,0	5.000,0	0,0
BPK	189.058,8	129.158,8	59.900,0	59.900,0	0,0
Mahkamah Agung	59.510,4	29.510,4	30.000,0	30.000,0	0,0
Kejaksaan Agung	1.109.306,8	894.306,8	215.000,0	215.000,0	0,0
Kepresidenan	232.479,6	192.479,6	40.000,0	40.000,0	0,0
Sekretariat Negara	1.151.959,0	560.666,0	591.293,0	591.293,0	0,0
Badan/Lembaga Negara Non Departemen	1.201.564,8	605.314,8	596.250,0	596.250,0	0,0
Departemen Dalam Negeri	3.183.979,2	1.833.979,2	1.350.000,0	1.350.000,0	0,0
Departemen Luar Negeri	6.223.425,6	5.713.425,6	510.000,0	510.000,0	0,0
Departemen Pertahanan/Keamanan	86.310.000,0	82.310.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	0,0
Departemen Kehakiman	3.312.427,2	2.457.427,2	855.000,0	855.000,0	0,0
Departemen Penerangan	2.605.522,0	1.598.272,0	1.007.250,0	757.250,0	250.000,0
Departemen Keuangan	4.529.933,6	3.181.933,6	1.348.000,0	1.348.000,0	0,0
Bagian Pembiayaan/Perhitungan	90.840.513,2	74.776.813,2	16.063.700,0	10.081.500,0	5.982.200,0
Departemen Perdagangan	968.274,8	493.274,8	475.000,0	475.000,0	0,0
Departemen Pertanian	10.083.065,2	930.565,2	9.152.500,0	5.779.900,0	3.372.600,0
Departemen Perindustrian	5.899.400,4	433.900,4	5.465.500,0	1.885.000,0	3.580.500,0
Departemen Pertambangan	2.085.939,6	186.939,6	1.899.000,0	899.000,0	1.000.000,0
Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik	47.598.077,0	1.046.800,0	46.551.277,0	33.690.077,0	12.861.200,0
Departemen Perhubungan	19.709.856,0	1.465.056,0	18.244.800,0	10.807.300,0	7.437.500,0
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	18.622.957,2	12.522.997,2	6.100.000,0	5.500.000,0	600.000,0
Departemen Kesehatan	9.084.596,0	4.134.596,0	4.950.000,0	4.000.000,0	950.000,0
Departemen Agama	7.162.135,2	6.162.135,2	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0
Departemen Tenaga Kerja	1.023.010,8	452.250,8	570.760,0	370.760,0	200.000,0
Departemen Sosial	883.428,4	610.228,4	275.200,0	275.200,0	0,0
Departemen Transmigrasi & Koperasi	2.033.985,2	733.985,2	1.300.000,0	1.300.000,0	0,0
Jumlah	327.418.430,0	204.044.000,0	123.374.430,0	87.140.430,0	36.234.000,0

(Dalam ribuan rupiah)

LEMBAGA/DEPARTEMEN BELANJA	MPRS	DPRGR	DPA	BPK	Mahkamah Agung	Kejaksaaan Agung	Kepresidenan	Sekretariat Negara	Badan Lem. Pem. Non Dep.	Dep. Dalam Negeri	Dep. Luar Negeri	Dep. Hankam	Dep. Kehakiman	Dep. Penerangan	Dep. Keuangan
BELANJA PEGAWAI/PENSIUN	74.282,4	105.646,8	4.651,2	37.312,0	8.510,4	614.736,8	94.337,6	130.778,0	330.432,8	1.394.282,4	2.744.679,6	51.792.000,0	1.319.287,2	1.066.771,6	1.775.668,4
Tunjangan beras (natura)	3.736,8	22.621,2	1.685,6	12.773,6	3.147,6	230.824,0	33.690,8	46.180,0	139.398,0	483.092,0	30.500,0	22.664.000,0	427.454,4	318.088,0	627.182,8
Tunjangan beras (cash)															
Gaji Upah/Pensiun	70.545,6	83.025,6	2.965,6	18.538,4	5.222,8	379.912,8	60.646,8	84.598,0	190.743,2	899.743,4	58.796,4	27.796.000,0	816.900,8	710.883,6	1.074.196,8
Lain-lain belanja pegawai				6.000,0	140,0	4.000,0			291,6	12.000,0	2.024,0		18.000,0	5.000,0	15.200,0
Belanja pegawai luar negeri											2.653.359,2	1.332.000,0	56.932,0	32.800,0	59.088,8
BELANJA BARANG	96.325,2	275.503,2	31.615,2	91.846,8	21.000,0	279.570,0	98.142,0	429.888,0	274.882,0	439.696,8	2.968.746,0	30.518.000,0	1.138.140,0	531.550,4	1.406.265,2
Uang makan/lauk-pauk						6.480,0			6.480,0	15.292,8		8.604.000,0	764.040,0		44.366,4
Belanja barang dalam negeri	93.125,2	254.383,2	31.615,2	90.246,8	21.000,0	234.690,0	97.457,2	375.488,0	191.420,0	424.404,0	304.786,0	14.146.000,0	363.900,0	300.440,0	1.208.202,8
Belanja barang luar negeri	3.200,0	21.120,0		1.600,0		38.400,0	684,8	54.400,0	76.982,0		2.663.960,0	4.660.000,0	9.600,0	231.110,4	153.696,0
PERIMBANGAN KEUANGAN															
Irian Barat															
Lain-lain daerah Otonom															
BUNGA/CICILAN HUTANG															
Hutang-hutang dalam negeri															
Hutang-hutang luar negeri															
PENGELUARAN RUTIN															
Stabilisasi beras															
Haji/Pers. Pemilu															
Pengeluaran tahun-tahun yang lalu															
JUMLAH	170.607,6	381.150,0	36.266,4	129.158,8	29.510,4	894.306,8	192.479,6	560.666,0	605.314,8	1.833.979,2	5.713.425,6	82.310.000,0	2.457.427,2	1.598.322,0	3.181.933,6

ANGGARAN RUTIN 1969-1970

Lampiran II b
(Lanjutan)

(Dalam ribuan rupiah)

LEMBAGA/DEPARTEMEN BELANJA	Bag. Pembiayaan dan Perhitungan	Dep. Perdagangan	Dep. Pertanian	Dep. Perindustrian	Dep. Pertambangan	Dep. PU & Tenaga Listrik	Dep. Perhubungan	Dep. P & K	Dep. Kesehatan	Dep. Agama	Dep. Tenaga Kerja	Dep. Sosial	Dep. Trans & Kop.	JUMLAH
BELANJA PEGAWAI/PENSIUN	9.374.706,8	299.164,4	762.481,2	297.567,6	116.858,0	530.800,0	993.246,0	10.566.557,2	1.931.836,0	5.854.535,2	259.170,8	318.228,4	609.521,2	93.408.000,0
Tunjangan beras (natura)	6.121.358,8	76.968,4	254.800,0	95.472,4	43.762,0	179.840,0	323.960,0	3.128.400,0	747.936,0	2.070.772,0	82.288,0	91.083,6	214.984,0	38.476.000,0
Tunjangan beras (cash)	3.180.313,6	164.596,0	487.441,2	171.611,6	71.576,0	343.360,0	647.624,0	5.464.772,8	1.175.500,0	3.714.043,2	176.882,8	225.144,8	389.017,2	48.464.000,0
Gaji Upah/Pensiun			10.000,0	2.018,0	1.520,0	7.600,0	1.182,0	1.869.384,4	8.400,0	69.720,0		2.000,0	5.520,0	2.040.000,0
Lain-lain belanja pegawai	73.034,4	57.600,0	10.240,0	28.465,6			20.480,0	104.000,0						4.428.000,0
Belanja pegawai luar negeri														
BELANJA BARANG	5.290.106,4	194.110,4	168.084,0	136.332,8	70.081,6	516.000,0	471.810,0	1.956.400,0	2.202.760,0	307.600,0	193.080,0	292.000,0	124.464,0	50.524.000,0
Uang makan/lauk-pauk			41.040,0				150.728,0		820.800,0					13.801.587,2
Belanja barang dalam negeri	5.290.106,4	85.950,4	118.724,0	110.732,8	67.400,0	516.000,0	313.102,0	1.380.400,0	735.560,0	243.600,0	193.080,0	47.440,0	124.464,0	27.363.718,0
Belanja barang luar negeri		108.160,0	8.320,0	25.600,0	2.681,6		7.980,0	576.000,0	646.400,0	64.000,0		4.800,0		9.358.694,8
PERIMBANGAN KEUANGAN	41.412.000,0													41.412.000,0
Irian Barat	8.000.000,0													8.000.000,0
Lain-lain daerah Otonom	33.412.000,0													33.412.000,0
BUNGA/CICILAN HUTANG	16.500.000,0													16.500.000,0
Hutang-hutang dalam negeri	1.000.000,0													1.000.000,0
Hutang-hutang luar negeri	15.500.000,0													15.500.000,0
PENGELUARAN RUTIN	2.200.000,0													2.200.000,0
Stabilisasi beras														
Haji/Pers. Pemilu	2.200.000,0													2.200.000,0
Pengeluaran tahun-tahun yang lalu														
JUMLAH	74.776.813,2	493.274,8	930.565,2	433.900,4	186.939,6	1.046.800,0	1.465.056,0	12.522.957,2	4.134.596,0	6.162.135,2	452.250,8	610.228,4	733.985,2	204.044.000,0

Lampiran II C

RANCANGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN 1969/1970

(Dalam ribuan rupiah)

BIDANG / SEKTOR	MPRS	DPRGR	DPA	BPK	Mahkamah Agung	Kejaksaan Agung	Kepresidenan	Sekretariat Negara	Badan Lem.Pen. NontDep.	Dep. Dalam Negeri	Dep. Luar Negeri	Dep. Hankam	Dep. Kehakiman	Dep. Penerangan	Dep. Keuangan	
I. ANGGARAN RUPIAH																
1. BIDANG EKONOMI																
1.1. Sektor Pertanian dan Irigasi																
1.2. Sektor Industri dan Pertambangan																
1.3. Sektor Tenaga Listrik																
1.4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata																
1.5. Sektor Desa																
2. BIDANG SOSIAL																
2.1. Sektor Agama																
2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan																
2.3. Sektor Tenaga Kerja																
2.4. Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana																
2.5. Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum																
2.6. Sektor Penerangan																
2.7. Sektor Tertib Hukum																
3. BIDANG UMUM																
3.1. Sektor Pemerintahan Umum	10.000	709.000	5.000	59.900	30.000	215.000	40.000	97.500	102.000	550.000	10.000	4.000.000	830.000	116.305,0	1.273.000,0	
3.2. Sektor Pertahanan dan Keamanan	10.000	10.000	5.000	25.000			40.000	97.500	102.000	550.000	10.000	4.000.000		116.305,0		
3.3. Sektor Badan-badan Legislatif		699.000		34.900												
3.4. Sektor Pengurusan Keuangan Negara																
JUMLAH	10.000	709.000	5.000	59.900	30.000	215.000	40.000	97.500	596.250	1.350.000	510.000	4.000.000	855.000	757.250	1.273.000	1.348.000
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS																
1. BIDANG EKONOMI																
2. BIDANG SOSIAL																
3. BIDANG UMUM																
JUMLAH																
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN																
1. BIDANG EKONOMI																
2. BIDANG SOSIAL																
3. BIDANG UMUM	10.000,0	709.000,0	5.000,0	59.900,0	30.000,0	215.000,0	40.000,0	97.500,0	596.250,0	1.350.000,0	510.000,0	4.000.000,0	855.000,0	1.007.250,0	1.273.000,0	1.348.000,0
JUMLAH	10.000,0	709.000,0	5.000,0	59.900,0	30.000,0	215.000,0	40.000,0	97.500,0	596.250,0	1.350.000,0	510.000,0	4.000.000,0	855.000,0	1.007.250,0	1.273.000,0	1.348.000,0

Lampiran II C
(Lanjutan)
(Dalam ribuan rupiah)

RANCANGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN 1969/1970

BIDANG / SEKTOR	Bag. Pembayaan dan Perhitungan	Dep. Perdagangan	Dep. Pertanian	Dep. Perindustrian	Dep. Pertambangan	Dep. PU & Tenaga Listrik	Dep. Perhubungan	Dep. P & K	Dep. Kesehatan	Dep. Agama	Dep. Tenaga Kerja	Dep. Sosial	Dep. Trans & Kop.	JUMLAH
I. ANGGARAN RUPIAH														
1. BIDANG EKONOMI	9.881.500,0		4.837.000,0	1.260.000,0	745.000,0	31.295.000,0	10.432.300,0	0,0			100.000,0	0,0	800.000,0	60.200.800,0
1.1. Sektor Pertanian dan Irigasi	791.500,0		4.837.000,0	1.260.000,0	745.000,0	19.705.000,0							800.000,0	26.133.300,0
1.2. Sektor Industri dan Pertambangan	6.390.000,0					4.590.000,0	10.432.300,0							8.395.000,0
1.3. Sektor Tenaga Listrik	100.000,0					7.000.000,0								4.690.000,0
1.4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata	2.600.000,0													17.982.300,0
1.5. Sektor Desa														3.000.000,0
2. BIDANG SOSIAL	200.000,0	100.000,0	524.900,0	325.000,0	4.000,0	1.894.302,0	110.000,0	5.500.000,0	4.000.000,0	854.000,0	247.760,0	225.200,0	365.000,0	17.604.150,0
2.1. Sektor Agama		100.000,0	524.900,0	325.000,0	4.000,0	594.302,0	110.000,0	5.500.000,0	325.000,0	286.000,0	216.760,0	20.250,0	365.000,0	606.000,0
2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan										568.000,0	31.000,0			9.937.000,0
2.3. Sektor Tenaga Kerja	200.000,0													231.000,0
2.4. Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana									3.659.000,0					3.659.000,0
2.5. Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum						1.300.000,0			16.000,0					1.320.000,0
2.6. Sektor Penerangan												204.950,0		589.520,0
2.7. Sektor Tertib Hukum														1.060.000,0
3. BIDANG UMUM		375.000,0	418.000,0	300.000,0	150.000,0	500.775,0	265.000,0			146.000,0	23.000,0	50.000,0	135.000,0	9.335.480,0
3.1. Sektor Pemerintahan Umum		375.000,0	418.000,0	300.000,0	150.000,0	500.775,0	265.000,0			146.000,0	23.000,0	50.000,0	135.000,0	3.328.580,0
3.2. Sektor Perumahan dan Keamanan														4.000.000,0
3.3. Sektor Badan-badan Legislatif														699.000,0
3.4. Sektor Pengurusan Keuangan Negara														
JUMLAH	10.081.500	475.000	5.779.900	1.885.000	899.000	33.690.077,0	10.807.300,0	5.500.000,0	4.000.000,0	1.000.000,0	370.760,0	275.200	1.300.000	87.140.430
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS														
1. BIDANG EKONOMI	5.982.200,0		3.372.600,0	3.580.500,0	1.000.000,0	12.861.200,0	7.437.500,0	600.000,0	950.000,0		200.000,0			34.234.000,0
2. BIDANG SOSIAL														2.000.000,0
3. BIDANG UMUM														
JUMLAH	5.982.200	0	3.372.600	3.580.500	1.000.000	12.861.200	7.437.500	600.000	950.000	0	200.000	0	0	36.234.000
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN														
1. BIDANG EKONOMI	15.863.700,0		8.209.600,0	4.840.500,0	1.745.000,0	44.156.200,0	17.869.800,0				100.000,0		800.000,0	94.434.800,0
2. BIDANG SOSIAL	200.000,0	100.000,0	524.900,0	325.000,0	4.000,0	1.894.302,0	110.000,0	6.100.000,0	4.950.000,0	854.000,0	447.760,0	225.200,0	365.000,0	19.644.150,0
3. BIDANG UMUM		375.000,0	418.000,0	300.000,0	150.000,0	500.775,0	265.000,0			146.000,0	23.000,0	50.000,0	135.000,0	9.295.480,0
JUMLAH	16.063.700	475.000	9.152.500	5.465.500	1.899.000	46.551.277	18.244.800	6.100.000	4.950.000	1.000.000	570.760	275.200	1.300.000	123.374.430

Lampiran II d

ANGGARAN PEMBANGUNAN
I. BIDANG EKONOMI

BIDANG / SEKTORSUB SEKTOR/PROGRAM.	MPRS	DPRGR	DPA	BPK	Mahkamah Agung	Kejaksanaan Agung	Kepresidenaan	Sekretariat Negara	Badan Lem.NonD ep.	Dep. Dalam Negeri
I. ANGGARAN RUPIAH										
I.1. Sektor Pertanian dan Irigasi										
I.1.1. Sub-Sektor Pertanian										
I.1.1.1. Program Peningkatan Produksi Bahan makanan										
I.1.1.2. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Perkebunan										
I.1.1.3. Program Peningkatan Produksi Perikanan										
I.1.1.4. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Kehutanan dan Pembinaan Hutan										
I.1.1.5. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Peternakan										
I.1.2. Sub-Sektor Irigasi										
I.1.2.1. Program Penyelamatan Tanah dan Air										
I.1.2.2. Program Perbaikan Irigasi										
I.1.2.3. Program Perluasan Irigasi										
I.1.2.4. Program Perbaikan dan Pergamanan Sungai										
I.1.2.5. Program Pembangunan Irigasi lainnya.										
I.2. Sektor Industri dan Pertambangan										
I.2.1 Sub-Sektor Industri										
I.2.1.1. Program Perbaikan dan Perluasan Industri Pupuk, Semen dan Kimia										
I.2.1.2. Program Perbaikan Industri Tekstil										
I.2.1.3. Program Perbaikan Industri Kertas										
I.2.1.4. Program Perluasan Industri Farmasi										
I.2.1.5. Program Pembinaan Industri Ringan dan Kerajinan Rakyat										
I.2.1.6. Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, peralatan dan Prasarana Perhubungan										
I.2.1.7. Program Pemanfaatan Proyek-proyek tertunda										
I.2.2. Sub-Sektor Pertambangan										
I.2.2.1. Program Penelitian Minyak dan Gas Bumi										
I.2.2.2. Program Perbaikan Pertambangan Timah										
I.2.2.3. Program Perbaikan Tambang Batu-Bara										
I.2.2.4. Program Peningkatan Kegiatan Geologi										
I.2.2.5. Program Perbaikan Fasilitas Pembinaan Pertambangan										
I.3. Sektor Tenaga Listrik										
I.3.1. Sub-Sektor Tenaga Listrik										
I.3.1.1. Program Peningkatan Tenaga Listrik										
I.4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata										
I.4.1. Sub-sektor Perhubungan										
I.4.1.1. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (jalan dan jembatan)										
I.4.1.2. Program Peningkatan Fasilitas Angkutan Jalan										
I.4.1.3. Program Peningkatan dan Perbaikan Angkutan Kereta Api										
I.4.1.4. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut										
I.4.1.5. Program Perbaikan Armada Niaga										
I.4.1.6. Program Perbaikan Angkutan Sungai										
I.4.1.7. Program Pembinaan Prasarana Perhubungan Udara										
I.4.1.8. Program Pembinaan Armada Udara Niaga										
I.4.1.9. Program Peningkatan Jasa Pos dan Giro										
I.4.1.10. Program Perbaikan dan Peningkatan Jasa Telekomunikasi										
I.4.2. Sub-Sektor Pariwisata										
I.4.2.1. Program Pengembangan Pariwisata									50.000,0	300.000,0
I.5. Sektor Desa									50.000,0	300.000,0
I.5.1. Sub-Sektor Desa										
I.5.1.1. Program Pembangunan Desa									50.000,0	300.000,0
Jumlah									50.000,0	300.000,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS										
III ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG EKONOMI)									50.000,0	300.000,0

Lampiran II d
(Lanjutan)

ANGGARAN PEMBANGUNAN
I. BIDANG EKONOMI

BIDANG / SEKTORSUB SEKTOR/PROGRAM.	Dep. Luar Negeri	Dep. Hankam	Dep. Kehakiman	Dep. Penerangan	Dep. Keuangan	Bag. Pembiayaan dan Perhitungan	Dep. Perdagangan	Dep. Pertanian	Dep. Perindustrian
I. ANGGARAN RUPIAH									
I.1. Sektor Pertanian dan Irigasi								4.437.000,0	
I.1.1. Sub-Sektor Pertanian						791.500,0		2.198.000,0	
I.1.1.1. Program Peningkatan Produksi Bahan makanan						694.000,0		1.104.000,0	
I.1.1.2. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Perkebunan						75.000,0		34.000,0	
I.1.1.3. Program Peningkatan Produksi Perikanan						22.500,0		579.000,0	
I.1.1.4. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Kehutanan dan Pembinaan Hutan								245.000,0	
I.1.1.5. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Peternakan								400.000,0	
I.1.2. Sub-Sektor Irigasi								400.000,0	
I.1.2.1. Program Penyelamatan Tanah dan Air									
I.1.2.2. Program Perbaikan Irigasi									
I.1.2.3. Program Perluasan Irigasi									
I.1.2.4. Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai									
I.1.2.5. Program Pembangunan Irigasi lainnya.									
I.2. Sektor Industri dan Pertambangan									1.260.000,0
I.2.1 Sub-Sektor Industri						5.690.000,0			
I.2.1.1. Program Perbaikan dan Perluasan Industri Pupuk, Semen dan Kimia						1.010.000,0			
I.2.1.2. Program Perbaikan Industri Tekstil						1.250.000,0			
I.2.1.3. Program Perbaikan Industri Kertas						570.000,0			
I.2.1.4. Program Perluasan Industri Farmasi									560.000,0
I.2.1.5. Program Pembinaan Industri Ringan dan Kerajinan Rakyat						960.000,0			
I.2.1.6. Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, peralatan dan Prasarana Perhubungan						1.900.000,0			
I.2.1.7. Program Pemanfaatan Proyek-proyek tertunda						700.000,0			700.000,0
I.2.2. Sub-Sektor Pertambangan									
I.2.2.1. Program Penelitian Minyak dan Gas Bumi									
I.2.2.2. Program Perbaikan Pertambangan Timah									
I.2.2.3. Program Perbaikan Tambang Batu-Bara						700.000,0			
I.2.2.4. Program Peningkatan Kegiatan Geologi									
I.2.2.5. Program Perbaikan Fasilitas Pembinaan Pertambangan									
I.3. Sektor Tenaga Listrik						100.000,0			
I.3.1. Sub-Sektor Tenaga Listrik						100.000,0			
I.3.1.1. Program Peningkatan Tenaga Listrik						100.000,0			
I.4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata									
I.4.1. Sub-sektor Perhubungan	500.000,0								
I.4.1.1. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (jalan dan jembatan)									
I.4.1.2. Program Peningkatan Fasilitas Angkutan Jalan									
I.4.1.3. Program Peningkatan dan Perbaikan Angkutan Kereta Api									
I.4.1.4. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut									
I.4.1.5. Program Perbaikan Armada Niaga									
I.4.1.6. Program Perbaikan Angkutan Sungai									
I.4.1.7. Program Pembinaan Prasarana Perhubungan Udara									
I.4.1.8. Program Pembinaan Armada Udara Niaga									
I.4.1.9. Program Peningkatan Jasa Pos dan Giro									
I.4.1.10. Program Perbaikan dan Peningkatan Jasa Telekomunikasi	500.000,0								
I.4.2. Sub-Sektor Pariwisata									
I.4.2.1. Program Pengembangan Pariwisata						2.600.000,0			
I.5. Sektor Desa						2.600.000,0			
I.5.1. Sub-Sektor Desa									
I.5.1.1. Program Pembangunan Desa									
	500.000,0					9.881.500,0		4.837.000,0	1.260.000,0
Jumlah	500.000,0					5.982.200,0		3.372.600,0	3.580.500,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS									
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG EKONOMI)	500.000,0					15.863.700,0		8.209.600,0	4.840.500,0

Lampiran II d
(Lanjutan)

ANGGARAN PEMBANGUNAN
I. BIDANG EKONOMI

BIDANG / SEKTORSUB SEKTOR/PROGRAM.	Dep. Pertambangan	Dep. PU & Tenaga Listrik	Dep. Perhubungan	Dep. P & K	Dep. Kesehatan	Dep. Agama	Dep. Tenaga Kerja	Dep. Sosial	Dep. Trans & Kop.	JUMLAH
I. ANGGARAN RUPIAH										
I.1. Sektor Pertanian dan Irigasi										26.133.500,0
I.1.1. Sub Sektor Pertanian										5.228.500,0
I.1.1.1. Program Peningkatan Produksi Bahan makanan										2.198.000,0
I.1.1.2. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Perkebunan										1.798.000,0
I.1.1.3. Program Peningkatan Produksi Perikanan										386.000,0
I.1.1.4. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Kehutanan dan Pembinaan Hutan										601.500,0
I.1.1.5. Program Peningkatan Produksi Hasil-hasil Peternakan										245.000,0
I.1.2. Sub-Sektor Irigasi		19.705.000,0							800.000,0	20.505.000,0
I.1.2.1. Program Penyelamatan Tanah dan Air										400.000,0
I.1.2.2. Program Perbaikan Irigasi		6.350.000,0								6.350.000,0
I.1.2.3. Program Perluasan Irigasi		6.425.000,0								6.425.000,0
I.1.2.4. Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai		1.400.000,0								1.400.000,0
I.1.2.5. Program Pembangunan Irigasi lainnya.		5.530.000,0								6.330.000,0
I.2. Sektor Industri dan Pertambangan										8.395.000,0
I.2.1 Sub-Sektor Industri										6.950.000,0
I.2.1.1. Program Perbaikan dan Perluasan Industri Pupuk, Semen dan Kimia										1.010.000,0
I.2.1.2. Program Perbaikan Industri Tekstil										1.250.000,0
I.2.1.3. Program Perbaikan Industri Kertas										570.000,0
I.2.1.4. Program Perluasan Industri Farmasi										
I.2.1.5. Program Pembinaan Industri Ringan dan Kerajinan Rakyat										1.520.000,0
I.2.1.6. Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, peralatan dan Prasarana Perhubungan										1.900.000,0
I.2.1.7. Program Pemanfaatan Proyek-proyek tertunda										700.000,0
I.2.2. Sub-Sektor Pertambangan	745.000,0									1.445.000,0
I.2.2.1. Program Penelitian Minyak dan Gas Bumi	100.000,0									100.000,0
I.2.2.2. Program Perbaikan Pertambangan Timah										700.000,0
I.2.2.3. Program Perbaikan Tambang Batu-Bara										
I.2.2.4. Program Peningkatan Kegiatan Geologi	382.000,0									700.000,0
I.2.2.5. Program Perbaikan Fasilitas Pembinaan Pertambangan	263.000,0									1.445.000,0
I.3. Sektor Tenaga Listrik		4.590.000,0								700.000,0
I.3.1. Sub-Sektor Tenaga Listrik		4.590.000,0								382.000,0
I.3.1.1. Program Peningkatan Tenaga Listrik		4.590.000,0								263.000,0
I.4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata										700.000,0
I.4.1. Sub-sektor Perhubungan			10.432.300,0							382.000,0
I.4.1.1. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (jalan dan jembatan)			7.000.000,0							263.000,0
I.4.1.2. Program Peningkatan Fasilitas Angkutan Jalan			90.000,0							700.000,0
I.4.1.3. Program Peningkatan dan Perbaikan Angkutan Kereta Api			2.978.300,0							382.000,0
I.4.1.4. Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut			3.688.000,0							263.000,0
I.4.1.5. Program Perbaikan Armada Niaga										700.000,0
I.4.1.6. Program Perbaikan Angkutan Sungai			110.000,0							90.000,0
I.4.1.7. Program Pembinaan Prasarana Perhubungan Udara			1.560.000,0							2.978.300,0
I.4.1.8. Program Pembinaan Armada Udara Niaga										3.688.000,0
I.4.1.9. Program Peningkatan Jasa Pos dan Giro										110.000,0
I.4.1.10. Program Perbaikan dan Peningkatan Jasa Telekomunikasi			1.896.000,0							1.560.000,0
I.4.2. Sub-Sektor Pariwisata										110.000,0
I.4.2.1. Program Pengembangan Pariwisata										2.396.000,0
I.5. Sektor Desa										50.000,0
I.5.1. Sub-Sektor Desa										3.000.000,0
I.5.1.1. Program Pembangunan Desa							100.000,0			3.000.000,0
							100.000,0			3.000.000,0
Jumlah	745.000,0	31.295.000,0	10.432.300,0				800.000,0			60.200.800,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS	1.000.000,0	12.361.200,0	7.437.500,0							34.234.000,0
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG EKONOMI)	1.745.000,0	43.656.200,0	17.869.800,0							94.434.800,0

BIDANG /SEKTOR SUB SEKTOR/PROGRAM.	MPRS	DPRGR	DPA	BPK	Mahkamah Agung	Kekajsaan Agung	Kepresideman	Sekretariat Negara	Badan Lem. NonDep.	Dep. Dalam Negeri
I. ANGGARAN RUPIAH										
2.1. Sektor Agama										
2.1.1. Sub Sektor Agama								320.000,0		
2.1.1.1. Program Penyediaan Sarana Kehidupan Beragama										
2.1.1.2. Program Penerangan dan Bimbingan Agama										
2.1.1.3. Program Peningkatan Kesejahteraan Perjalanan Haji/Ziarah										
2.1.1.4. Program Pengawasan dan Bantuan kepada Lembaga-lembaga Keagamaan Swasta										
2.1.1.5. Program Pembangunan Masjid Istiqlal								320.000,0		
2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan										
2.2.1. Sub Sektor Pendidikan										
2.2.1.1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar										
2.2.1.2. Program Penambahan Pendidikan Kejuruan pada Sekolah Lanjutan Umum										
2.2.1.3. Program Peningkatan Pendidikan Teknik dan Kejuruan										
2.2.1.4. Program Peningkatan Pendidikan Guru										
2.2.1.5. Program Pembinaan Perguruan Tinggi										
2.2.1.6. Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa										
2.2.2. Sub Sektor Kebudayaan										
2.2.2.1. Program Pengembangan Kebudayaan Nasional										
2.2.2.2. Program Peningkatan Kegiatan Olah Raga						15.000,0		83.000,0	444.250,0	500.000,0
2.2.3. Sub Sektor Pendidikan dan Penelitian Insitusional						15.000,0		16.800,0	115.000,0	500.000,0
2.2.3.1. Program Pendidikan/Latihan Insitusional								73.993,0	329.250,0	
2.2.3.2. Program Peningkatan/Survey										
2.3. Sektor Tenaga Kerja										
2.3.1. Sub Sektor Tenaga Kerja										
2.3.1.1. Program Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja										
2.3.1.2. Program Pembinaan Keahlian dan Kejuruan										
2.3.1.3. Program Pembinaan Norma-norma Perlindungan Kerja										
2.4. Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana										
2.4.1. Sub Sektor Kesehatan										
2.4.1.1. Program Pendidikan Kesehatan Masyarakat										
2.4.1.2. Program Pengembangan Infrastruktur Kesehatan										
2.4.1.3. Program Pemberantasan Penyakit Menular										
2.4.1.4. Program Penulisan dan Peningkatan Kesehatan										
2.4.1.5. Program Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan										
2.4.1. Sub Sektor Keluarga Berencana										
2.4.1.1. Program Pembinaan Keluarga Berencana										
2.5. Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum										
2.5.1. Sub Sektor Perumahan Rakyat, Tata Kota dan Tata Daerah										
2.5.1.1. Program Penyuluhan Pembangunan Perumahan Kota dan Perumahan Desa.										
2.5.1.2. Program Perencanaan Tata-Kota dan Tata-Daerah										
2.5.2. Sub Sektor Kesejahteraan Sosial										
2.5.2.1. Program Pembinaan Perubahan Sosial										
2.5.2.2. Program Bantuan Sosial										
2.5.3. Sub Sektor Air Minum dan Asscinering										
2.5.3.1. Program Peningkatan Persediaan Air Minum										
2.5.3.2. Program Peningkatan Asscinering										
2.6. Sektor Penerangan										
2.6.1. Sub Sektor Penerangan										
2.6.1.1. Program Peningkatan Penerangan Rakyat										
2.6.1.2. Program Pengembangan Alat-alat Mass media										
2.7. Sektor Tertib Hukum										
2.7.1. Sub Sektor Tertib Hukum										
2.7.1.1. Program Pembinaan Tertib Hukum										
2.7.1.2. Program Pemasayakatan/Reklasering										
Jumlah					30.000,0	215.000,0		493.793,0	444.250,0	500.000,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS										
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG SOSIAL)					30.000,0	215.000,0		493.793,0	444.250,0	500.000,0

ANGGARAN PEMBANGUNAN
2. BIDANG SOSIAL

Lampiran II e
(Lanjutan)

BIDANG / SEKTOR SUBSEKTOR/PROGRAM.	Dep. Luar Negeri	Dep. Hankam	Dep. Kehakiman	Dep. Penerangan	Dep. Keuangan	Bag. Pembay- an dan Perhitungan	Dep. Perda- ngan	Dep. Pertanian	Dep. Perindus- trian
I. ANGGARAN RUPIAH									
2.1. Sektor Agama									
2.1.1. Sub Sektor Agama									
2.1.1.1. Program Penyediaan Sarana Kehidupan Beragama									
2.1.1.2. Program Penerangan dan Bimbingan Agama									
2.1.1.3. Program Peningkatan Kesejahteraan Perjalanan Haji/Ziarah									
2.1.1.4. Program Pengawasan dan Bantuan kepada Lembaga-lembaga Keagamaan Swasta									
2.1.1.5. Program Pembangunan Masjid Istiqlal									
2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan									
2.2.1. Sub Sektor Pendidikan									
2.2.1.1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar									
2.2.1.2. Program Penambahan Pendidikan Kejuruan pada Sekolah Lanjutan Umum									
2.2.1.3. Program Peningkatan Pendidikan Teknik dan Kejuruan									
2.2.1.4. Program Peningkatan Pendidikan Guru									
2.2.1.5. Program Pembinaan Perguruan Tinggi									
2.2.1.6. Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa									
2.2.2. Sub Sektor Kebudayaan									
2.2.2.1. Program Pengembangan kebudayaan Nasional									
2.2.2.2. Program Peningkatan Kegiatan Olah Raga									
2.2.3. Sub Sektor Pendidikan dan Penelitian Institusional									
2.2.3.1. Program Pendidikan/Latihan Institusional									
2.2.3.2. Program Peningkatan/Survey									
2.3. Sektor Tenaga Kerja									
2.3.1. Sub Sektor Tenaga Kerja									
2.3.1.1. Program Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja									
2.3.1.2. Program Pembinaan Keahlian dan Kejuruan									
2.3.1.3. Program Pembinaan Norma-norma Perlindungan Kerja									
2.4. Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana									
2.4.1. Sub Sektor Kesehatan									
2.4.1.1. Program Pendidikan Kesehatan Masyarakat									
2.4.1.2. Program Pengembangan Infrastruktur Kesehatan									
2.4.1.3. Program Pemberantasan Penyakit Menular									
2.4.1.4. Program Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan									
2.4.1.5. Program Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan									
2.4.1. Sub Sektor Keluarga Berencana									
2.4.1.1. Program Pembinaan Keluarga Berencana									
2.5. Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum									
2.5.1.1. Program Penyuluhan Pembangunan Perumahan Kota dan Perumahan Desa.									
2.5.1.2. Program Perencanaan Tata-Kota dan Tata-Daerah									
2.5.2. Sub Sektor Kesejahteraan Sosial									
2.5.2.1. Program Pembinaan Perubahan Sosial									
2.5.2.2. Program Bantuan Sosial									
2.5.3. Sub Sektor Air Minum dan Asseinerjing									
2.5.3.1. Program Peningkatan Persediaan Air Minum									
2.5.3.2. Program Peningkatan Asseinerjing									
2.6. Sektor Penerangan									
2.6.1. Sub Sektor Penerangan									
2.6.1.1. Program Peningkatan Penerangan Rakyat									
2.6.1.2. Program Pengembangan Alat-alat Mass media									
2.7. Sektor Tertib Hukum									
2.7.1. Sub Sektor Tertib Hukum									
2.7.1.1. Program Pembinaan Tertib Hukum									
2.7.1.2. Program Pemasyarakatan/Reklasering									
Jumlah									
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS									
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG SOSIAL)									
			855.000,0	890.945,0	75.000,0	200.000,0	100.000,0	524.900,0	325.000,0
			855.000,0	890.945,0	75.000,0	200.000,0	100.000,0	524.900,0	325.000,0

ANGGARAN PEMBANGUNAN
2. BIDANG SOSIAL

Lampiran II e
(Lanjutan)

BIDANG / SEKTOR SUB SEKTOR/PROGRAM.	Dep. Pertambangan	Dep. PU & Tenaga Listrik	Dep. Perhubungan	Dep. P & K	Dep. Kesehatan	Dep. Agama	Dep. Tenaga Kerja	Dep. Sosial	Dep. Trans & Kop.	JUMLAH
I. ANGGARAN RUPIAH										
2.1. Sektor Agama										606.000,0
2.1.1. Sub Sektor Agama						286.000,0				606.000,0
2.1.1.1. Program Penyediaan Sarana Kehidupan Beragama						200.000,0				200.000,0
2.1.1.2. Program Penerangan dan Bimbingan Agama						49.000,0				49.000,0
2.1.1.3. Program Peningkatan Kesejahteraan Perjalanan Haji/Ziarah						24.000,0				24.000,0
2.1.1.4. Program Pengawasan dan Bantuan kepada Lembaga-lembaga Keagamaan Swasta						13.000,0				13.000,0
2.1.1.5. Program Pembangunan Masjid Istiqlal						13.000,0				320.000,0
2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				5.213.000,0						9.937.680,0
2.2.1. Sub Sektor Pendidikan										5.213.000,0
2.2.1.1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar				360.000,0						360.000,0
2.2.1.2. Program Penambahan Pendidikan Kejuruan pada Sekolah Lanjutan Umum				300.000,0						300.000,0
2.2.1.3. Program Peningkatan Pendidikan Teknik dan Kejuruan				2.454.000,0						2.454.000,0
2.2.1.4. Program Peningkatan Pendidikan Guru				239.000,0						239.000,0
2.2.1.5. Program Pembinaan Perguruan Tinggi				1.700.000,0						1.700.000,0
2.2.1.6. Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa				160.000,0						160.000,0
2.2.2. Sub Sektor Kebudayaan										370.000,0
2.2.2.1. Program Pengembangan kebudayaan Nasional				287.000,0						287.000,0
2.2.2.2. Program Peningkatan Kegiatan Olah Raga				196.000,0						196.000,0
2.2.2.3. Program Peningkatan Penelitian dan Penelitian Institusional				91.000,0						91.000,0
2.2.3. Sub Sektor Pendidikan dan Penelitian Institusional										4.354.680,0
2.2.3.1. Program Pendidikan/Latihan Institusional	4.000,0	594.302,0	100.000,0		325.000,0	568.000,0	216.760,0	20.250,0	365.000,0	4.354.680,0
2.2.3.2. Program Peningkatan/Survey	4.000,0	313.026,0	100.000,0		305.000,0	533.000,0	209.760,0	18.000,0	295.000,0	3.199.811,0
2.3. Sektor Tenaga Kerja										231.000,0
2.3.1. Sub Sektor Tenaga Kerja										231.000,0
2.3.1.1. Program Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja										210.000,0
2.3.1.2. Program Pembinaan Keahlian dan Kejuruan										17.000,0
2.3.1.3. Program Pembinaan Norma-norma Perlindungan Kerja										4.000,0
2.4. Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana										3.659.000,0
2.4.1. Sub Sektor Kesehatan										3.659.000,0
2.4.1.1. Program Pendidikan Kesehatan Masyarakat					42.000,0					42.000,0
2.4.1.2. Program Pengembangan Infrastruktur Kesehatan					1.655.000,0					1.655.000,0
2.4.1.3. Program Pemberantasan Penyakit Menular					836.000,0					836.000,0
2.4.1.4. Program Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan					106.000,0					106.000,0
2.4.1.5. Program Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan					900.000,0					900.000,0
2.4.1. Sub Sektor Keluarga Berencana										120.000,0
2.4.1.1. Program Pembinaan Keluarga Berencana					120.000,0					120.000,0
2.5. Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum										1.520.950,0
2.5.1. Sub Sektor Perumahan Rakyat, Tata Kota dan Tata Daerah										1.520.950,0
2.5.1.1. Program Penyuluhan Pembangunan Perumahan Kota dan Perumahan Desa.		250.000								180.000,0
2.5.1.2. Program Perencanaan Tata-Kota dan Tata-Daerah		180.000,0								70.000,0
2.5.1.3. Program Pengadaan Perumahan Kota dan Perumahan Desa.		70.000,0								204.950,0
2.5.2. Sub Sektor Kesejahteraan Sosial										25.079,0
2.5.2.1. Program Pembinaan Perubahan Sosial										179.871,0
2.5.2.2. Program Bantuan Sosial										179.871,0
2.5.3. Sub Sektor Air Minum dan Asseinerig										1.066.000,0
2.5.3.1. Program Peningkatan Persediaan Air Minum		1.050.000,0			16.000,0			204.950,0		1.066.000,0
2.5.3.2. Program Peningkatan Asseinerig		50.000,0			16.000,0					1.016.000,0
2.6. Sektor Penerangan										50.000,0
2.6.1. Sub Sektor Penerangan										589.520,0
2.6.1.1. Program Peningkatan Penerangan Rakyat										589.520,0
2.6.1.2. Program Pengembangan Alat-alat Mass media										81.075,0
2.7. Sektor Terlibit Hukum										508.445,0
2.7.1. Sub Sektor Terlibit Hukum										1.060.000,0
2.7.1.1. Program Pembinaan Terlibit Hukum										1.060.000,0
2.7.1.2. Program Pemasyrakatan/Reklasering										645.000,0
Jumlah	4.000,0	1.894.302,0	110.000,0	5.500.000,0	4.000.000,0	854.000,0	247.760,0	225.200,0	365.000,0	17.604.150,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS				600.000,0	950.000,0		200.000,0			2.000.000,0
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG SOSIAL)	4.000,0	1.894.302,0	110.000,0	6.100.000,0	4.950.000,0	854.000,0	447.760,0	225.200,0	365.000,0	19.604.150,0

ANGGARAN PEMBANGUNAN
2. BIDANG UMUM

Lampiran II f

(Dalam ribuan rupiah)

BIDANG / SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM.	MPRS	DPRGR	DPA	BPK	Mahkamah Agung	Kejaksaan Agung	Kepresidenan	Sekretariat Negara	Badan Lem.Pem. NonDep.	Dep. Dalam Negeri
I. ANGGARAN RUPIAH										
3.1. Sektor Pemerintahan Umum	10.000,0	10.000,0	5.000,0	25.000,0			40.000,0	97.500,0	102.000,0	550.000,0
3.1.1. Sub Sektor Pemerintahan Umum										
3.1.1.1. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintahan										
3.1.1.2. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	10.000,0	10.000,0	5.000,0	25.000,0			40.000,0	90.000,0	102.000,0	550.000,0
3.2. Sektor Pertahanan dan Keamanan										
3.2.1. Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan										
3.2.1.1. Program Pembinaan Tenaga Manusia										
3.2.1.2. Program Pembinaan Daya Tempur										
3.2.1.3. Program Perluasan Industri ABRI										
3.2.1.4. Program Perluasan Potensi Pembangunan										
3.3. Sektor Badan-Badan Perwakilan										
3.3.1. Sub Sektor Badan-Badan Perwakilan										
3.3.1.1. Program Peningkatan Produk-Produk Legislatif		699.000,0								
699.000,0										
3.4. Sektor Pengurusan Keuangan Negara										
3.4.1. Sub Sektor Pengurusan Keuangan Negara										
3.4.1.1. Program Peningkatan Penerimaan Negara				34.900,0						
3.4.1.2. Program Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara										
3.4.1.3. Program Peningkatan Tata Usaha Keuangan Negara										
3.4.1.4. Program Peningkatan Pengawasan Keuangan Negara										
Jumlah	10.000,0	709.000,0	5.000,0	59.900,0			40.000,0	97.500,0	102.000,0	550.000,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS										
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG UMUM)	10.000,0	709.000,0	5.000,0	59.900,0			40.000,0	97.500,0	102.000,0	550.000,0

ANGGARAN PEMBANGUNAN
2. BIDANG UMUM

Lampiran II f
(Lanjutan)

(Dalam ribuan rupiah)

BIDANG / SEKTOR / SUB SEKTOR / PROGRAM.	Dep. Luar Negeri	Dep. Hankam	Dep. Kehakiman	Dep. Penerangan	Dep. Keuangan	Bag. Pembiayaan dan Perhitungan	Dep. Perdagangan	Dep. Pertanian	Dep. Perindustrian
I. ANGGARAN RUPIAH									
3.1. Sektor Pemerintahan Umum									
3.1.1. Sub Sektor Pemerintahan Umum	10.000,0			116.305,0			375.000,0	418.000,0	300.000,0
3.1.1.1. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintahan							175.000,0		
3.1.1.2. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	10.000,0			116.305,0			200.000,0	418.000,0	300.000,0
3.2. Sektor Pertahanan dan Keamanan									
3.2.1. Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan		4.000.000,0							
3.2.1.1. Program Pembinaan Tenaga Manusia		1.000.000,0							
3.2.1.2. Program Pembinaan Daya Tempur		750.000,0							
3.2.1.3. Program Perluasan Industri ABRI		100.000,0							
3.2.1.4. Program Perluasan Potensi Pembangunan		1.250.000,0							
3.3. Sektor Badan-Badan Perwakilan									
3.3.1. Sub Sektor Badan-Badan Perwakilan									
3.3.1.1. Program Peningkatan Produk-Produk Legislatif									
3.4. Sektor Pengurusan Keuangan Negara									
3.4.1. Sub Sektor Pengurusan Keuangan Negara					1.273.000,0				
3.4.1.1. Program Peningkatan Penerimaan Negara					918.000,0				
3.4.1.2. Program Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara					235.000,0				
3.4.1.3. Program Peningkatan Tata Usaha Keuangan Negara					50.000,0				
3.4.1.4. Program Peningkatan Pengawasan Keuangan Negara					70.000,0				
Jumlah		4.000.000,0		116.305,0	1.273.000,0		375.000,0	418.000,0	300.000,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS									

ANGGARAN PEMBANGUNAN
2. BIDANG UMUM

Lampiran II f
(Lanjutan)
(Dalam ribuan rupiah)

BIDANG / SEKTORSUB SEKTOR/PROGRAM.	Dep. Pertambangan	Dep. PU & Tenaga Listrik	Dep. Perhubungan	Dep. P & K	Dep. Kesehatan	Dep. Agama	Dep. Tenaga Kerja	Dep. Sosial	Dep. Trans & Kop.	JUMLAH
I. ANGGARAN RUPIAH										
3.1. Sektor Pemerintahan Umum										3.328.580,0
3.1.1. Sub Sektor Pemerintahan Umum	150.000,0	500.775,0	265.000,0			146.000,0	23.000,0	50.000,0	135.000,0	3.328.580,0
3.1.1.1. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintahan										432.500,0
3.1.1.2. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	150.000,0	500.775,0	265.000,0			146.000,0	23.000,0	50.000,0	135.000,0	2.896.080,0
3.2. Sektor Pertahanan dan Keamanan										4.000.000,0
3.2.1. Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan										4.000.000,0
3.2.1.1. Program Pembinaan Tenaga Manusia										1.000.000,0
3.2.1.2. Program Pembinaan Daya Tempur										750.000,0
3.2.1.3. Program Perluasan Industri ABRI										1.000.000,0
3.2.1.4. Program Perluasan Potensi Pembangunan										1.250.000,0
3.3. Sektor Badan-Badan Perwakilan										699.000,0
3.3.1. Sub Sektor Badan-Badan Perwakilan										699.000,0
3.3.1.1. Program Peningkatan Produk-Produk Legislatif										699.000,0
3.4. Sektor Pengurusan Keuangan Negara										1.307.900,0
3.4.1. Sub Sektor Pengurusan Keuangan Negara										1.307.900,0
3.4.1.1. Program Peningkatan Penerimaan Negara										918.000,0
3.4.1.2. Program Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara										235.000,0
3.4.1.3. Program Peningkatan Tata Usaha Keuangan Negara										50.000,0
3.4.1.4. Program Peningkatan Pengawasan Keuangan Negara										104.900,0
Jumlah	150.000,0	500.775,0	265.000,0			146.000,0	23.000,0	50.000,0	135.000,0	9.335.480,0
II. BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEKNIS										
III. ANGGARAN PEMBANGUNAN (BIDANG UMUM)	150.000,0	500.775,0	265.000,0			146.000,0	23.000,0	50.000,0	135.000,0	9.335.480,0

BANTUAN PROYEK/BANTUAN TEHNIK 1969/1970
(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Departemen / Lembaga										Jumlah	
	Dep. Kehakiman	Dep. Tenaga Listrik	Dep. PU & Tenaga Listrik	Dep. Perindustrian	Dep. Pertambangan	Dep. Perhubungan	Dep. P & K	Dep. Kesehatan	Dep. Penerangan	Dep. Tenaga Kerja		Bank
1. BIDANG EKONOMI												
1.1. Sektor Pertanian dan Irigasi	3.372.600,0	12.861.200,0	3.580.500,0		1.000.000,0	7.437.500,0					5.982.200,0	34.234.000,0
1.1.1. Sub Sektor Pertanian	3.372.600,0	4.965.200,0									662.200,0	9.000.000,0
1.1.2. Sub Sektor Irigasi	34.800,0	4.965.200,0									662.200,0	4.000.000,0
1.2. Sektor Industri dan Pertambangan			3.580.500,0		1.000.000,0						5.320.000,0	5.000.000,0
1.2.1. Sub Sektor Industri			3.580.500,0		1.000.000,0						5.320.000,0	8.900.500,0
1.2.2. Sub Sektor Pertambangan												1.000.000,0
1.3. Sektor Tenaga Listrik		6.195.000,0										6.195.000,0
1.3.1. Sub Sektor Tenaga Listrik		6.195.000,0										6.195.000,0
1.4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata		1.701.000,0				7.437.500,0						9.138.500,0
1.4.1. Sub Sektor Perhubungan		1.701.000,0				7.437.500,0						1.701.000,0
2. BIDANG SOSIAL												
2.2. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan								950.000,0	250.000,0			2.000.000,0
2.2.1. Sub Sektor Pendidikan								950.000,0	250.000,0			600.000,0
2.3. Sektor Tenaga Kerja										200.000,0		600.000,0
2.3.1. Sub Sektor Tenaga Kerja										200.000,0		200.000,0
2.4. Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana								950.000,0				950.000,0
2.4.1. Sub Sektor Kesehatan								950.000,0				600.000,0
2.4.2. Sub Sektor Keluarga Berencana												350.000,0
2.6. Sektor Penerangan									250.000,0			250.000,0
2.6.1. Sub Sektor Penerangan									250.000,0			250.000,0
Jumlah	3.372.600,0	12.861.200,0	3.580.500,0		1.000.000,0	7.437.500,0		600.000,0	250.000,0	200.000,0	5.982.200,0	36.234.000,0

Lampiran III - 1

ANGGARAN PEMBANGUNAN 1969 - 1970
Perincian menurut Bidang, Sektor, Sub Sektor dan Program
(dalam ribuan rupiah)

Bidang	Anggaran Pembangunan		
	Rupiah	Bantuan Proyek dan Bantuan Tehnis	Jumlah
1. Bidang Ekonomi	60.200.800	34.234.000	94.434.800
2. Bidang Sosial	17.604.150	2.000.000	19.604.150
3. Bidang Umum	9.335.480	-	9.335.480
Jumlah	87.140.430	36.234.000	123.374.430

Lampiran III - 2

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.1.	Sektor Pertanian dan Irigasi	Rp. 26.133.500
1.1.1.	Sub Sektor Pertanian	Rp. 5.228.500
1.1.1.1.	Program Peningkatan Produksi Bahan Makanan	Rp. 2.198.000
1.1.1.2.	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	Rp. 1.798.000
1.1.1.3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Rp. 386.000
1.1.1.4.	Program Peningkatan Produksi Hasil Kehutanan dan Pembinaan Hutan	Rp. 601.500
1.1.1.5.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp. 245.000

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.1.	Sektor Pertanian dan Irigasi	Rp. 26.133.500
1.1.2.	Sub Sektor Irigasi	Rp. 20.905.000
1.1.2.1.	Program Penyelamatan Tanah dan Air	Rp. 400.000
1.1.2.2.	Program Perbaikan Irigasi	Rp. 6.350.000
1.1.2.3.	Program Perluasan Irigasi	Rp. 6.425.000
1.1.2.4.	Program Perbaikan dan Pengamanan Sungai	Rp. 1.400.000
1.1.2.5.	Program Pembangunan Irigasi Lainnya	Rp. 6.330.000

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.2.	Sektor Industri dan Pertambangan	Rp. 8.395.000
1.2.1.	Sub Sektor Industri	Rp. 6.950.000
1.2.1.1.	Program Perbaikan dan Perluasan Industri Pupuk, Semen dan Kimia	Rp. 1.010.000
1.2.1.2.	Program Perbaikan Industri Tekstil	Rp. 1.250.000
1.2.1.3.	Program Perbaikan Industri Kertas	Rp. 570.000
1.2.1.4.	Program Perluasan Industri Pharmasi	Rp. -
1.2.1.5.	Program Pembinaan Industri Ringan dan Kerajinan Rakyat	Rp. 1.520.000
1.2.1.6.	Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, Peralatan dan Prasarana Pembangunan.	Rp. 1.900.000
1.2.1.7.	Program Pemanfaatan Proyek-proyek Tertunda	Rp. 700.000

Lampiran III - 5

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.2.	Sektor Industri dan Pertambangan	Rp. 8.395.000
1.2.2.	Sub Sektor Pertambangan	Rp. 1.445.000
1.2.2.1.	Program Penelitian Minyak dan gas bumi	Rp. 100.000
1.2.2.2.	Program Perbaikan Pertambangan Timah	Rp. -
1.2.2.3.	Program Perbaikan Tambang Batu-Bara	Rp. 700.000
1.2.2.4.	Program Peningkatan Kegiatan Geologi	Rp. 382.000
1.2.2.5.	Program Perbaikan Fasilitas Pembinaan Pembangunan	Rp. 263.000

Lampiran III - 6

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.3.	Sektor Tenaga Listrik	Rp. 4.690.000
1.3.1.	Sub Sektor Tenaga Listrik	Rp. 4.690.000
1.3.1.1.	Program Peningkatan Tenaga Listrik	Rp. 4.690.000

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	Rp. 17.980.300
1.4.1.	Sub Sektor Perhubungan	Rp. 17.932.300
1.4.1.1.	Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Darat (Jalan dan Jembatan)	Rp. 7.000.000
1.4.1.2.	Program Peningkatan Angkutan Jalan Fasilitas Jalan	Rp. 90.000
1.4.1.3.	Program Perbaikan dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	Rp. 2.978.300
1.4.1.4.	Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Laut	Rp. 3.688.000
1.4.1.5.	Program Perbaikan Armada Niaga	Rp. -
1.4.1.6.	Program Pembinaan Angkutan Sungai	Rp. 110.000
1.4.1.7.	Program Perbaikan Prasarana Perhubungan Udara	Rp. 1.560.000
1.4.1.8.	Program Permbinaan Armada Udara Niaga	Rp. -
1.4.1.9.	Program Peningkatan Jasa Pos dan Giro	Rp. 110.000
1.4.10.	Program Perbaikan dan Peningkatan Jasa Telekomunikasi	Rp. 2.396.000

Lampiran III - 8**ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH**

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	Rp. 17.982.000
1.4.2.	Sub Sektor Pariwisata	Rp. 50.000
1.4.2.1.	Program Pengembangan Pariwisata	Rp. 50.000

Lampiran III - 9**ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH**

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 60.200.800
1.5.	Sektor Desa	Rp. 3.000.000
1.5.1.	Sub Sektor Desa	Rp. 3.000.000
1.5.1.2.	Program Pembangunan Desa	Rp. 3.000.000

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.1.	Sektor Agama	Rp. 606.000
2.1.1.	Sub Sektor Agama	Rp. 606.000
2.1.1.1.	Program Penyediaan Sarana Kehidupan Beragama	Rp. 200.000
2.1.1.2.	Program Penerangan dan Bimbingan Agama	Rp. 49.000
2.1.1.3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Perjalanan Haji	Rp. 24.000
2.1.1.4.	Program Pengawasan dan Bantuan kepada Lembaga-lembaga Keagamaan swasta	Rp. 13.000
2.1.1.5.	Program Pembangunan Masjid Istiqlal	Rp. 320.000

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.2.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 9.937.680
2.2.1.	Sub Sektor Pendidikan	Rp. 5.213.000
2.2.1.1.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 360.000
2.2.1.2.	Program Penambahan Pendidikan Kejuruan pada Sekolah Lanjutan Umum	Rp. 300.000
2.2.1.3.	Program Peningkatan Pendidikan Teknik dan Kejuruan	Rp. 2.454.000
2.2.1.4.	Program Peningkatan Pendidikan Guru	Rp. 239.000
2.2.1.5.	Program Pembinaan Perguruan Tinggi	Rp. 1.700.000
2.2.1.6.	Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa	Rp. 160.000

Lampiran III - 12

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.2.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 9.937.680
2.2.2.	Sub Sektor Kebudayaan	Rp. 370.000
2.2.2.1.	Program Pengembangan Kebudayaan Nasional	Rp. 279.000
2.2.2.2.	Program Peningkatan Kegiatan Olah Raga	Rp. 91.000

Lampiran III - 13

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.2.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 9.937.680
2.2.3.	Sub Sektor Pendidikan dan Penelitian Institutionil	Rp. 4.354.680
2.2.3.1.	Program Pendidikan/Latihan Institutionil	Rp. 3.199.811
2.2.3.2.	Program Peningkatan Penelitian/Survey	Rp. 1.154.689

Lampiran III - 14

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.3.	Sektor Tenaga Kerja	Rp. 231.000
2.3.1.	Sub Sektor Tenaga Kerja	Rp. 231.000
2.3.1.1.	Program Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja	Rp. 210.000
2.3.1.2.	Program Pembinaan Keahlian dan Kejuruan	Rp. 17.000
2.3.1.3.	Program Pembinaan Norma-norma Perlindungan Kerja	Rp. 4.000

Lampiran III - 15

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.4.	Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana	Rp. 3.659.000
2.4.1.	Sub Sektor Kesehatan	Rp. 3.539.000
2.4.1.1.	Program Pendidikan Kesehatan Masyarakat	Rp. 42.000
2.4.1.2.	Program Pengembangan Infrastruktur Kesehatan	Rp. 1.655.000
2.4.1.3.	Program Pemberantasan Penyakit Menular	Rp. 836.000
2.4.1.4.	Program Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan	Rp. 106.000
2.4.1.5.	Program Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan	Rp. 900.000

Lampiran III - 16

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.4.	Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana	Rp. 3.659.000
2.4.2.	Sub Sektor Keluarga Berencana	Rp. 120.000
2.4.2.1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 120.000

Lampiran III - 17

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.5.	Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum	Rp. 1.520.950
2.5.1.	Sub Sektor Kesejahteraan Sosial Tata Daerah	Rp. 250.000
2.5.1.1.	Program Penyuluhan Pembangunan Perumahan Kota dan Perumahan Desa	Rp. 180.000
2.5.1.2.	Program Perencanaan Tata Kota dan Tata Daerah	Rp. 70.000

Lampiran III - 18

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.5.	Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan penyediaan Air Minum	Rp. 1.520.950
2.5.2.	Sub Sektor Kesejahteraan Sosial	Rp. 204.950
2.5.2.1.	Program Pembinaan Perubahan Sosial	Rp. 25.079
2.5.2.2.	Program Bantuan Sosial	Rp. 179.871

Lampiran III - 19

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.5.	Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum	Rp. 1.520.950
2.5.3.	Sub Sektor Air Minum dan Assainering	Rp. 1.066.000
2.5.3.1.	Program Peningkatan Persediaan Air Minum	Rp. 1.016.000
2.5.3.2.	Program Peningkatan Assainering	Rp. 50.000

Lampiran III - 20

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.6.	Sektor Penerangan	Rp. 589.520
2.6.1.	Sub Sektor Penerangan	Rp. 589.520
2.6.1.1.	Program Peningkatan Penerangan Rakyat	Rp. 81.075
2.6.1.2.	Program Pengembangan Alat-alat Mass-media	Rp. 508.445

Lampiran III - 21

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 17.604.150
2.7.	Sektor Tertib Hukum	Rp. 1.060.000
2.7.1.	Sub Sektor Tertib Hukum	Rp. 1.060.000
2.7.1.1.	Program Pembinaan Tertib Hukum	Rp. 645.000
2.7.1.2.	Program Pemasyarakatan/Reklasing	Rp. 415.000

Lampiran III - 22

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
3.	BIDANG UMUM	Rp. 9.335.480
3.1.	Sektor Pemerintahan Umum	Rp. 3.328.580
3.1.1.	Sub Sektor Pemerintah Umum	Rp. 3.328.580
3.1.1.1.	Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintahan	Rp. 432.500
3.1.1.2.	Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Rp. 2.896.080

Lampiran III - 23

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
3.	BIDANG UMUM	Rp. 9.335.480
3.2.	Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp. 4.000.000
3.2.1.	Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp. 4.000.000
3.2.1.1.	Program Pembinaan Tenaga Manusia	Rp. 1.000.000
3.2.1.2.	Program Pembinaan Daya Tempur	Rp. 750.000
3.2.1.3.	Program Perluasan Industri ABRI	Rp. 1.000.000
3.2.1.4.	Program Perluasan Potensi Pembangunan	Rp. 1.250.000

Lampiran III - 24

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
3.	BIDANG UMUM	Rp. 9.335.480
3.3.	Sektor Badan-badan Perwakilan	Rp. 699.000
3.3.1.	Sub Sektor Badan-badan Perwakilan	Rp. 699.000
3.3.1.1.	Program Peningkatan Produk-produk Legislatif	Rp. 699.000

Lampiran III - 25

ANGGARAN PEMBANGUNAN RUPIAH

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
3.	BIDANG UMUM	Rp. 9.335.480
3.4.	Sektor Pengurusan Keuangan Negara	Rp. 1.307.900
3.4.1.	Sub Sektor Pengurusan Keuangan Negara	Rp. 1.307.900
3.4.1.1.	Program Peningkatan Penerimaan Negara	Rp. 918.000
3.4.1.2.	Program Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara	Rp. 235.000
3.4.1.3.	Program Peningkatan Tata Usaha Keuangan Negara	Rp. 50.000
3.4.1.4.	Program Peningkatan Pengawasan Keuangan Negara	Rp. 104.900

**ANGGARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK DAN BANTUAN TEHNIS**

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
1.	BIDANG EKONOMI	Rp. 34.234.000
1.1.	Sektor Pertanian dan Irigasi	Rp. 9.000.000
1.1.1.	Sub Sektor Pertanian	Rp. 4.000.000
1.1.2.	Sub Sektor Irigasi	Rp. 5.000.000
1.2.	Sektor Industri dan Pertambangan	Rp. 9.900.500
1.2.1.	Sub Sektor Industri	Rp. 8.900.500
1.2.2.	Sub Sektor Pertambangan	Rp. 1.000.000
1.3.	Sektor Tenaga Listrik	Rp. 6.195.000
1.3.1.	Sub Sektor Tenaga Listrik	Rp. 6.195.000
1.4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	Rp. 9.138.500
1.4.1.	Sub Sektor Perhubungan	Rp. 9.138.500
1.4.2.	Sub Sektor Pariwisata	Rp. -
1.5.	Sektor Desa	Rp. -
1.5.1.	Sub Sektor Desa	Rp. -

**ANGGARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK DAN BANTUAN TEHNIS**

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
2.	BIDANG SOSIAL	Rp. 34.234.000
2.1.	Sektor Agama	Rp. -
2.1.1.	Sub Sektor Agama	Rp. -
2.2.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 600.000
2.2.1.	Sub Sektor Pendidikan	Rp. 600.000
2.2.2.	Sub Sektor Kebudayaan	Rp. -
2.2.3.	Sub Sektor Pendidikan dan Penelitian Institutionil	Rp. -
2.3.	Sektor Tenaga Kerja	Rp. 200.000
2.3.1.	Sub Sektor Tenaga Kerja	Rp. 200.000
2.4.	Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana	Rp. 950.000
2.4.1.	Sub Sektor Kesehatan	Rp. 600.000
2.4.2.	Sub Sektor Keluarga Berencana	Rp. 350.000
2.5.	Sektor Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan Air Minum	Rp. -
2.5.1.	Sub Sektor Perumahan Rakyat, Tata Kota dan Tata Daerah	Rp. -
2.5.2.	Sub Sektor Kesejahteraan Sosial	Rp. -
2.5.3.	Sub Sektor Air Minum dan Assainering	Rp. -
2.6.	Sektor Penerangan	Rp. 250.000
2.6.1.	Sub Sektor Penerangan	Rp. 250.000
2.7.	Sektor Tertib Hukum	Rp. -
2.7.1.	Sub Sektor Tertib Hukum	Rp. -

**ANGGARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK DAN BANTUAN TEHNIS**

(dalam ribuan rupiah)

Bidang/Sektor/Sub Sektor/Program	Uraian	Jumlah
3.	BIDANG UMUM	Rp. -
3.1.	Sektor Pemerintahan Umum	Rp. -
3.1.1.	Sub Sektor Pemerintahan Umum	Rp. -
3.2.	Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp. -
3.2.1.	Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp. -
3.3.	Sektor Badan-badan Perwakilan	Rp. -
3.3.1.	Sub Sektor Badan-badan Perwakilan	Rp. -
3.4.	Sektor Pengurusan Keuangan Negara	Rp. -
3.4.1.	Sub Sektor Pengurusan Keuangan Negara	Rp. -

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG No. Tahun 1969**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970
DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

MENIMBANG : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1969/1970 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

MENGINGAT : 1. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.53);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1969/1970.**

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara tahun 1969/1970 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan
 - b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 228.000.000.000,-
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp.99.418.430.000,-
- (4) Jumlah seluruh Pendapatan negara 1969/1970 menurut perkiraan berjumlah Rp.327.418.430.000,-
- (5) Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 terdiri atas :
 - a. Anggaran Belanja Rutin dan
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp.204.044.000.000,-
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp.123.374.430.000,-
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun 1969/1970 menurut perkiraan berjumlah Rp.327.418.430.000,-
- (5) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3.

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan Rutin,
 - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan,
 - c. Anggaran Belanja Rutin,
 - d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai :
 - a. Kebijakan Per Kreditan,
 - b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
- (4) Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam Pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
- (5) Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan hasil pemeriksaannya atas laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- (6) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Pasal 4.

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1969/1970 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Pasal 5.

- (1) Setelah tahun anggaran 1969/1970 berakhir, dimuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

.....

Presiden Republik Indonesia,

S O E H A R T O

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

A L A M S J A H

MAJOR JENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR